

“Memanfaatkan Stabilitas, Menuju Kebangkitan Ekonomi Negeri”

**Pidato Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah,
Pada Pertemuan Tahunan Perbankan 2007
12 Januari 2007**

**Assalamu’alaikum wr.wb,
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,**

I. Pengantar

Mengawali pidato malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertemu dalam suasana yang baik, di acara Pertemuan Tahunan Perbankan 2007.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya, atas nama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, juga ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2007. Semoga di tahun 2007 kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Tanpa terasa, malam ini adalah malam yang keempat kalinya saya berdiri di sini, di forum yang baik ini, di hadapan Bapak-Ibu sekalian, untuk menyampaikan arahan awal tahun Gubernur Bank Indonesia. Artinya, sudah hampir 4 (empat) tahun, saya menjabat Gubernur Bank Indonesia. Dengan segala kekurangan dan beberapa keberhasilan, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang saudara berikan selama ini.

II. Refleksi Dinamika Perekonomian Tahun 2006

A. Tahun 2006: Tahun Meraih Kembali Stabilitas

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian,

Tahun 2006, tahun yang baru beberapa hari kita lewati, adalah tahun yang penuh warna, yang menurut saya cukup mengesankan. Bagi penentu

kebijakan, baik di pemerintah, parlemen, dan juga Bank Indonesia, tahun 2006 adalah tahun yang ujungnya menyediakan ruang untuk menarik nafas agak lega, karena kita telah berhasil melewatinya meski masih penuh dengan catatan-catatan. Bagi para pengusaha, tahun 2006 adalah tahun dengan capaian yang agak bercampur. Bagi para pengusaha di sektor riil, terutama pada industri manufaktur, tahun 2006 terasa sebagai tahun yang menyesakkan. Tekanan persaingan dari negara-negara yang lebih efisien, dan lebih produktif, begitu beratnya. Sementara itu, bagi pengusaha industri ekstraktif, tahun 2006 adalah tahun yang memberikan banyak keuntungan, sebagaimana tercermin dari derasnya ekspor kita ke negara-negara mitra dagang utama. Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat kita, tahun 2006 adalah benar-benar tahun ujian. Ujian terhadap resiliensi dan kesabaran karena imbas kenaikan harga-harga yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kenaikan harga BBM pada tahun sebelumnya. Dengan segala peristiwa, fenomena dan dinamika di sepanjang perjalanan tahun 2006 tersebut, bagaimanapun juga, pada akhirnya tahun 2006 adalah tahun yang perlu kita syukuri.

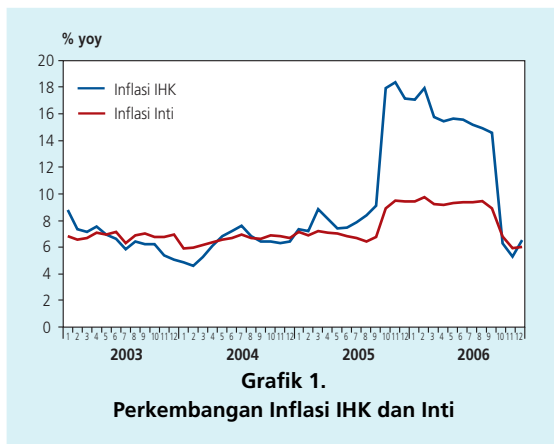
Oleh karena itu pada awal pidato saya malam ini, saya ingin mengajak Bapak – Ibu sekalian untuk bersama-sama melakukan perenungan, melihat sejenak pada catatan-catatan perjalanan yang telah kita lewati, sambil mengajukan beberapa pertanyaan mendasar terhadap niat, langkah, dan capaian-capaian pada tahun yang baru kita tinggalkan itu. Apa yang telah kita capai selama ini? Pekerjaan apa yang harus kita teruskan pada tahun yang akan datang? Apa yang kurang pada diri kita? Kerja keras? Keikhlasan? Tekad baja? Atau apa? Pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan sambil kita melihat ke sekeliling negeri ini dan bertanya berada dimanakah kita sekarang ini dalam perlombaan meraih kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa? Adakah kita masih tercecceh ditinggal oleh bangsa tetangga?

Pada bagian berikutnya, saya akan memaparkan sasaran-sasaran, target-target, harapan-harapan, dan impian yang akan kita anyam di tahun ini, tahun 2007. Pada bagian ini saya kira tak terhindarkan perlunya observasi yang mendalam dan analisis yang tajam, pada berbagai permasalahan yang dihadapi, dan pada tatanan serta dinamika sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang akan menjadi lahan tempat tumbuh dan berkembangnya perekonomian kita. Baru kemudian pada bagian akhir, saya akan menyampaikan beberapa pesan, program atau langkah lanjutan serta kebijakan yang akan dilakukan pada tahun ini, dengan satu tujuan, yaitu membuat perekonomian kita menjadi perekonomian yang lebih mensejahterakan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Rasanya masih segar dalam ingatan kita, bagaimana kita meninggalkan tahun 2005. Kita meninggalkan tahun 2005 dengan penuh harap dan sedikit kecemasan, karena meyakini bahwa bagian awal tahun 2006 adalah tahun yang masih menyisakan derita sebagai akibat guncangan global, khususnya kenaikan harga minyak dunia. Meskipun demikian, kita punya beberapa harapan di awal tahun 2006. Kita berharap, pertama, stabilitas akan bisa dikembalikan ke lintasan jalannya, dijaga dan terus dipelihara sehingga gairah perekonomian akan bisa kembali ke situasi yang seharusnya. Dan kedua, kita juga berharap dan berusaha agar keinginan pertama tersebut tercapai, sehingga semua hambatan rigiditas dan ketidakefisienan dalam perekonomian kita yang sudah struktural sifatnya dapat segera dikurangi.

Kita patut bersyukur karena pada tahun 2006 yang lalu, kita kembali meraih kestabilan makro ekonomi dan juga sistem keuangan. Berbagai indikator, yang pada tahun 2005 mengalami tekanan, di tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan. Tekanan inflasi yang masih cukup tinggi di awal tahun 2006, secara perlahan tapi pasti menunjukkan penurunan di sepanjang tahun 2006 (Lihat Grafik 1)¹. Di akhir tahun 2006 inflasi tercatat sebesar 6,6% (yoy), atau berada di bawah kisaran sasaran $8 \pm 1\%$, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama-sama. Keberhasilan pengendalian inflasi di tahun 2006

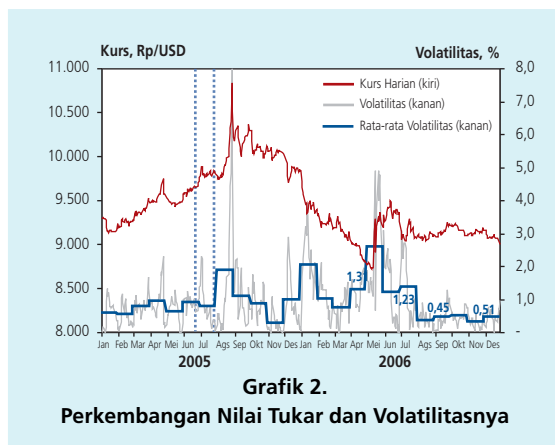


1 Jika kita menengok sedikit lebih jauh kebelakang, periode *outlier* sebagai akibat dari gejolak harga yang cukup signifikan dalam perekonomian umumnya berada diluar kendali kebijakan moneter. Secara rata-rata laju inflasi IHK dalam kurun 2003 – 2006 tercatat sekitar 6% yoy diluar *outlier*-nya di tahun 2005 yang mencapai sekitar 17%.

tersebut menunjukkan pula bahwa kebijakan moneter telah mampu memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM di penghujung 2005 pada ekspektasi inflasi.

Stabilisasi inflasi di tahun 2006 dan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang relatif baik dengan surplus sebesar 3,7% dari PDB telah pula menyumbang pada stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2006, setelah sempat terjadi depresiasi yang cukup signifikan di tahun 2005. Memasuki tahun 2006, volatilitas nilai tukar juga semakin rendah.

Tahun 2006 juga adalah tahun yang penting, karena pada tahun itu, kita melakukan pelunasan utang kepada IMF tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di pasar keuangan. Dengan dilunasinya utang IMF tersebut, kita telah menjadi anggota IMF biasa, bukan anggota IMF yang sakit. Meski telah dilakukan pembayaran kepada IMF, posisi cadangan devisa tetap terjaga. Hal ini menambah pada rasa nyaman pelaku ekonomi di pasar valas. Sepanjang tahun 2006 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung stabil di level 9100 – 9400 Rp/USD dengan volatilitas yang relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (Lihat Grafik 2).



Grafik 2.
Perkembangan Nilai Tukar dan Volatilitasnya

Di penghujung tahun 2006, timbul kekhawatiran akan terjadinya guncangan di pasar keuangan regional, akibat kebijakan bank sentral Thailand yang berkeinginan membatasi masuknya arus modal jangka pendek ke dalam sistem keuangannya. Kekhawatiran tersebut ternyata tidak terjadi. Meskipun sempat bergejolak sejenak, Rupiah kembali stabil dalam keseimbangan eksternalnya. Pilihan kebijakan yang diambil oleh Thailand, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan domestik dan kepentingan perekonomiannya. Kita

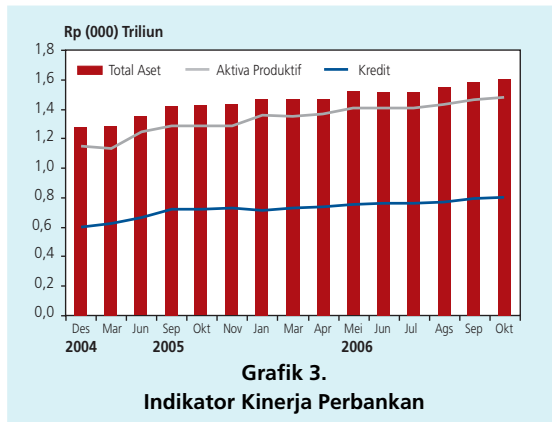
pun memiliki pertimbangan-pertimbangan kita sendiri di dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi kita. Dalam hal ini, Bank Indonesia berpandangan bahwa sistem devisa bebas yang telah kita anut selama ini masih sejalan dengan kepentingan nasional kita yang lebih luas. Teori ekonomi dari *Kydland dan Prescott* mengenai *time inconsistency* dalam penerapan suatu kebijakan tampaknya relevan untuk menjadi referensi dalam kaitannya dengan pilihan rezim kebijakan yang sudah kita tetapkan *ex-ante*. Tidak mudah untuk mengubah suatu rezim devisa yang sudah kita buka menjadi lebih tertutup tanpa menyebabkan *credibility loss*. Kredibilitas yang sudah kita bangun selama ini dengan susah payah, jangan sampai hilang hanya karena dorongan-dorongan untuk mengambil manfaat yang sifatnya sesaat.

Dengan perkembangan makroekonomi yang terjaga dengan baik, Bank Indonesia melihat ada ruang yang cukup untuk secara bertahap menurunkan BI Rate. Sepanjang tahun 2006, Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate sebesar 300 *basis points* yang pada akhir 2006 telah berada dibawah 2 (dua) *digit* yaitu sebesar 9,75%. Penurunan tersebut diambil untuk mempertahankan persepsi positif pelaku ekonomi, mendukung perbaikan iklim usaha, sekaligus menjaga stabilitas di pasar keuangan di tengah arus modal masuk untuk *portfolio placements* yang meningkat.

Stabilitas makroekonomi yang kembali kita raih juga memberikan ruang bagi pemulihan perekonomian yang semakin meluas (*broad-based*). Sejak paruh kedua 2006 fase ekspansi perekonomian nasional yang lebih luas mulai terlihat, terutama pada perkembangan indikator-indikator produksi, meskipun belum cukup berimbang karena masih belum kondusifnya iklim investasi dan masih menggejalanya ekonomi biaya tinggi. Investasi tumbuh lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, dan karena itu, ekspor dan permintaan konsumsi swasta masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada paruh kedua 2006 kita mulai melihat peningkatan pertumbuhan kredit, yang diikuti dengan percepatan belanja pemerintah sehingga membantu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pada akhir 2006 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,5% *yoy*².

Di bidang perbankan, selama 3 tahun terakhir ini, perlahan namun pasti, industri perbankan nasional memperoleh kemajuan-kemajuan yang cukup membesarkan hati. Secara kuantitatif, berbagai indikator kinerja keuangan dan operasional industri perbankan telah mengalami peningkatan cukup signifikan,

2 Perkiraan sementara Bank Indonesia.



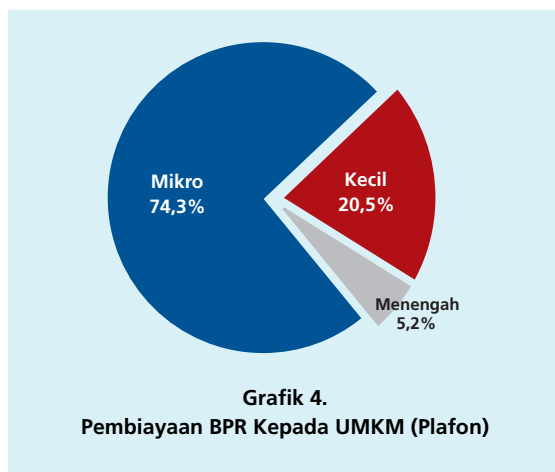
seperti tercermin pada pertumbuhan total aset yang didukung pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit (Lihat Grafik 3). Sampai dengan bulan November, total aset industri perbankan meningkat menjadi Rp1.635 T, sementara kredit bertambah sebesar Rp78,2 T (10,7%) sehingga jumlah keseluruhan kredit perbankan mencapai Rp806,3 T. Pertumbuhan kredit tersebut didanai oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp123 T (10,9%) yang secara kumulatif meningkat menjadi Rp1.251 T. Permodalan perbankan pun dapat terus bertahan pada tingkat yang memadai tercermin pada rasio kecukupan modal bank (CAR) yang dapat terus bertahan pada level yang cukup tinggi sekitar 20%.

Sementara itu, angka Non-Performing Loans (NPL) industri telah mengalami penurunan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh kondisi industri perbankan saat ini telah mengalami penguatan secara signifikan, dengan kinerja yang terus membaik dan berkesinambungan. Harus diakui, memang, kalau angka NPL industri perbankan saat ini sangat dipengaruhi oleh besarnya NPL bank-bank BUMN, yang masih menyisakan permasalahan dari masa lalu.

Secara kualitatif, kondisi kesehatan dan ketahanan industri perbankan selama beberapa tahun terakhir ini juga mengalami penguatan yang berarti. Kemampuan SDM perbankan mulai meningkat, dengan pemahaman konsepsi kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang lebih merata di semua lapisan organisasi. Sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern, sistem pengelolaan risiko, *good governance*, dan seluruh prosedur operasional yang mengikutinya, secara umum telah mengalami peningkatan yang cukup material. Kualitas pelayanan perbankan pun menjadi salah satu faktor penting yang ditangani peningkatannya melalui penciptaan sistem perlindungan nasabah yang terpercaya.

Di pasar modal, harga saham perbankan pun telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kemudian bergerak pada level yang stabil. Obligasi yang diterbitkan oleh perbankan juga mendapat respon yang positif dari pasar pada tingkat harga yang wajar. Dana pihak ketiga perbankan dari tahun ke tahun pun terus meningkat mencapai rata-rata 10% per tahun, meskipun suku bunga simpanan cenderung terus menurun mengikuti penurunan BI Rate. Kondisi ini boleh jadi merupakan indikasi kuat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah kembali dan mengalami penguatan. Bahkan, kita juga melihat, perubahan yang terjadi pada penjaminan Dana Pihak Ketiga Perbankan (DPK) yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2005, ternyata dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak yang mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kekhawatiran-kekhawatiran akan adanya *flight to safety* ataupun *flight to quality* dari para nasabah bank-bank kecil, akibat perubahan dari sistem penjaminan *blanket guarantee*, menjadi penjaminan terbatas oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), tampaknya tidak terbukti atau dapat ditekan pada tingkat yang minimal.

Di pihak lain, industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan pertumbuhan. Industri ini memiliki kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), masyarakat pedesaan dan pinggiran kota (lihat Grafik 4). Saat ini terdapat 1.901 BPR dengan 3.157 kantor, dengan total aset sebesar Rp 22,8 triliun dan portofolio kredit mencapai sekitar Rp 17 triliun (lihat Tabel 1). Dengan nilai kredit yang umumnya relatif kecil, maka untuk satuan kredit yang sama, rasio jumlah nasabah yang dilayani BPR jauh lebih besar dari pada bank umum.



Tabel 1.
Perkembangan Kinerja BPR

Miliar Rp

Keterangan	Des-03	Des-04	Des-05	Nov-06	Pertumbuhan Nov 06 - Des 06	
					Nominal	%
Total aktiva	12.635	16.707	20.393	22.825	2.432	11,93
Total Dana Pihak Ketiga	8.868	11.161	13.178	15.561	2.383	18,08
- Tabungan	2.617	3.301	3.757	4.448	691	18,39
- Deposito	6.251	7.860	9.421	11.113	1.692	17,96
Kredit yang Diberikan	8.985	12.149	14.654	17.041	2.387	16,29
Laba/Rugi Thn Berjalan	429	539	604	576	-28	-4,64
LDR	74,5%	80,7%	82,0%	82,2%	0,2%	
NPLs Gross	8,0%	7,6%	8,0%	9,9%	1,9%	
NPLs Net	5,5%	5,5%	5,8%	7,4%	1,6%	
CAR				19,5%		

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dalam kaitannya dengan pembangunan industri keuangan pada umumnya, dan industri perbankan pada khususnya, sejak empat tahun lalu, kami menyadari benar bahwa pengawasan dan pengaturan industri perbankan harus berlandaskan pada visi jangka panjang yang dalam strategi pencapaiannya harus didekati secara sistematis, terarah, dan terukur.

Untuk itulah, pada awal tahun 2004 lalu, Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sebuah *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan ke depan, yang menggariskan visi, arah dan bentuk yang akan dicapai. Seluruh kebijakan yang akan dilakukan BI untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut selama kurun waktu hingga akhir tahun 2010, diletakkan sebagai bagian dari kerangka kebijakan API ini.

Sejak itu, dengan bantuan Bapak-Ibu sekalian, Bank Indonesia terus berupaya menata dan memperbaiki kembali seluruh aspek kegiatan usaha perbankan. Kita banyak berdiskusi tentang segala bentuk ketentuan dan peraturan dari yang bersifat strategis, hingga yang bersifat teknis yang akhirnya kita pedomani sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Perlahan namun pasti, industri perbankan nasional memperoleh kemajuan-kemajuan yang cukup membesarkan hati. Setidaknya, pilar-pilar yang ditetapkan dalam API mulai bertransformasi menjadi pilar-pilar kekuatan industri perbankan yang menjanjikan stabilitas yang lebih mapan.

Di dalam penerapan *good corporate governance* (GCG), misalnya, hasil survey terakhir yang dilakukan Bank Indonesia, menunjukkan bahwa hampir seluruh bank telah melakukan *self assessment*. Hasil dari *self assessment* tersebut menyimpulkan bahwa sekitar 98% dari bank-bank di Indonesia telah menerapkan minimal 50% prinsip-prinsip GCG sebagaimana yang diwajibkan dalam PBI 8/4/PBI/2006, tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern, sistem pengelolaan risiko, dan seluruh prosedur operasional yang mengikutinya, secara umum telah mengalami perbaikan, meskipun belum menyeluruh.

Untuk lebih menjamin penegakkan *governance* dalam industri perbankan, kami telah mengambil sebuah langkah yang kami nilai strategis. Langkah tersebut kami harapkan dapat membantu membersihkan citra dan persepsi negatif terhadap sistem keuangan di Indonesia terutama yang terkait dengan kegiatan yang melawan hukum, seperti kejahatan perbankan, korupsi, dan *money laundering*. Langkah yang kami maksudkan adalah kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum-kepolisian, kejaksaan, PPATK-dan yang terakhir dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah-langkah kerjasama antara Bank Indonesia dengan para instansi penegak hukum tersebut diharapkan dapat menjawab persepsi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai tindak pidana perbankan, termasuk korupsi. Persepsi, pemahaman, kompetensi, dan tata kerja di dalam menangani berbagai masalah di bidang perbankan akan dapat diselesaikan dalam kerangka kerja yang utuh, cepat, obyektif dan proporsional. Dengan cara demikian, mudah-mudahan, kepercayaan masyarakat sebagai landasan bisnis perbankan senantiasa terjaga dengan aman dan semakin menguat dari waktu ke waktu karena dijamin oleh sistem penegakan hukum yang terpercaya.

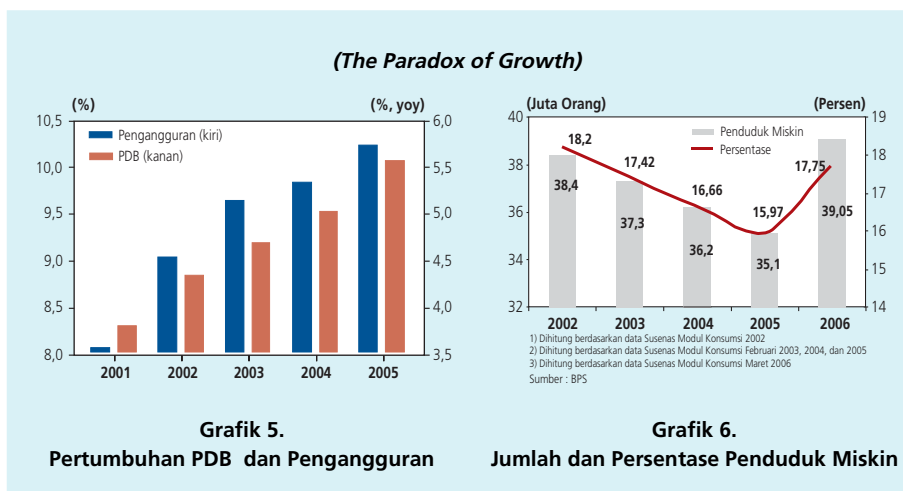
Dengan semua upaya yang telah kita lakukan selama ini, sedikit demi sedikit awan gelap yang menaungi industri perbankan nasional mulai tersibak. Tekad dan komitmen pun senantiasa kita perkuat demi keyakinan dan percaya diri bahwa nanti pada waktunya kita akan sampai pada tujuan akhir: "terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat, bermanfaat dan memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat".

B. Beberapa Catatan Permasalahan Tahun 2006

Bapak-Ibu hadirian sekalian yang berbahagia,

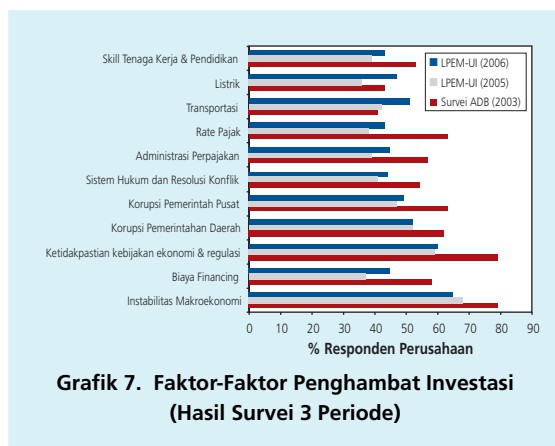
Atas dasar catatan-catatan tersebut, tidaklah berlebihan kalau mengatakan bahwa cukup banyak keberhasilan yang kita raih pada tahun 2006. Kita telah berhasil menempatkan kembali mesin perekonomian pada "track-nya" yang benar. Kita telah mengembalikan stabilitas makro ekonomi pada yang seharusnya. Kita telah mengurangi beban-beban biaya ekonomi yang terlalu tinggi sebagai akibat inflasi yang tinggi. Kita telah kembali menegaskan, bahwa pengelolaan ekonomi bangsa ini hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kita sendiri. Tetapi, di balik semua catatan keberhasilan itu kita juga menyadari masih beratnya beban bawaan *perennial*, yang kita tanggung dari tahun ke tahun yaitu rigiditas struktural dalam perekonomian kita yang melahirkan ketidakefisienan, menyia-nyiakan waktu dan sumber daya dalam bentuk eksekutifitas dan pengangguran, serta kemiskinan yang semakin memprihatinkan.

Saat ini, kondisi sektor riil yang merupakan tulang punggung kehidupan bangsa justru sedang berhadapan dengan sebuah fenomena paradoksal, yang tak terhindari. Struktur ekonomi kita cenderung bergerak kearah perekonomian yang padat modal ketimbang padat karya. Sementara itu, jumlah angka pengangguran masih dalam kecenderungan yang meningkat, padahal ekonomi telah menunjukkan geliat untuk tumbuh. Bahkan akhir-akhir ini kita dapat mencermati pula bahwa kemiskinan juga mulai kembali meningkat. Grafik 5 dan 6 memberi ilustrasi mengenai fenomena *the paradox of growth* tersebut.



Ada dugaan bahwa salah satu sumber persoalan *paradox of growth* ini terjadi adalah karena ketidakseimbangan struktural yang mengontrol perekonomian Indonesia. Distorsi yang disebabkan oleh struktur pasar dan industri yang oligopolistik, yang merupakan warisan sejarah perekonomian Indonesia, menyebabkan perekonomian kita memproduksi secara sub-optimal dan menghambat kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Distorsi-distorsi tersebut juga mengurangi akses dan partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan perekonomian. Keadaan ini sudah terlalu lama terjadi sehingga kita mungkin lupa untuk menanganinya. Kita harus segera membuka akses dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perekonomian, melalui perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, dan berbagai kemudahan lainnya. Saya kira, kita semua sudah memaklumi bahwa hanya melalui cara inilah pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan akan dapat tercapai, termasuk didalamnya pertumbuhan yang juga menyelesaikan masalah kesenjangan pendapatan yang lebih menyolok.

Dari argumen tersebut, jelaslah kiranya bahwa perbaikan iklim investasi, pembukaan akses dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian merupakan faktor penting dalam pemulihan ekonomi nasional di era paska krisis. Sementara itu, faktor-faktor penghambat investasi masih cukup banyak, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi lembaga-lembaga non-pemerintah seperti LPEM UI dan ADB. Perkembangan faktor-faktor penghambat investasi tersebut dalam setahun terakhir ini tampaknya menunjuk pada iklim investasi yang belum membaik secara menyeluruh. Bahkan, melihat hasil survei terakhir pada Grafik 7, beberapa faktor penghambat menunjukkan tren meningkat, misalnya pada: ketidakpastian



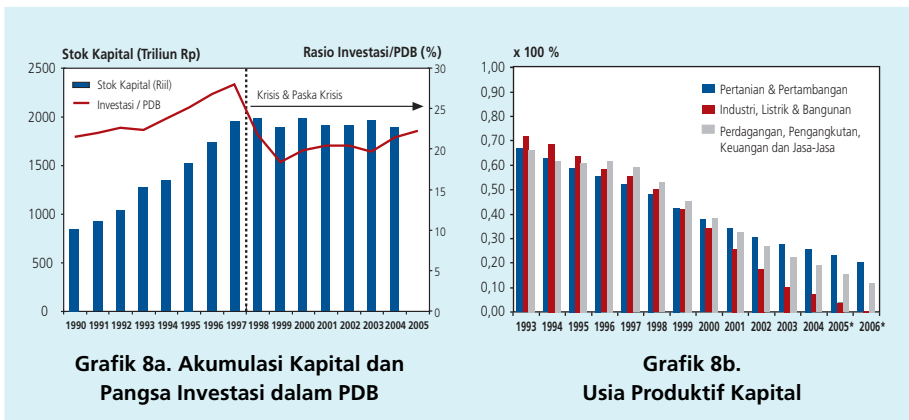
kebijakan ekonomi dan regulasi, korupsi, masalah yang terkait dengan perpajakan, masalah *skill* dan pendidikan tenaga kerja, infrastruktur terutama listrik dan transportasi, korupsi di pemerintah pusat, sistem hukum dan resolusi konflik, serta biaya *financing*. Terkait dengan hasil survei ini, kita pun dapat mencermati bahwa masalah revisi UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, UU Kepabeanaan, UU Penanaman Modal dan perbaikan infrastruktur dan ketahanan energi, kepastian hukum, dan keharmonisan regulasi antara Pusat dan Daerah, sering disinggung oleh para investor, domestik maupun asing, sebagai faktor utama penghambat kegiatan investasi pada tahun 2006.

Berbagai hal diatas menyebabkan para investor dan industri perbankan, baik asing maupun domestik, mempersepsikan tingkat risiko mikro struktural yang masih tinggi pada berbagai sektor usaha. Hal ini kemudian menyebabkan masih lemahnya minat untuk berinvestasi dalam jangka panjang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkembangan PMA ke Indonesia yang masih rendah di era paska krisis, walaupun potensi PMA ke negara-negara lain di kawasan Asia saat ini sangat tinggi.

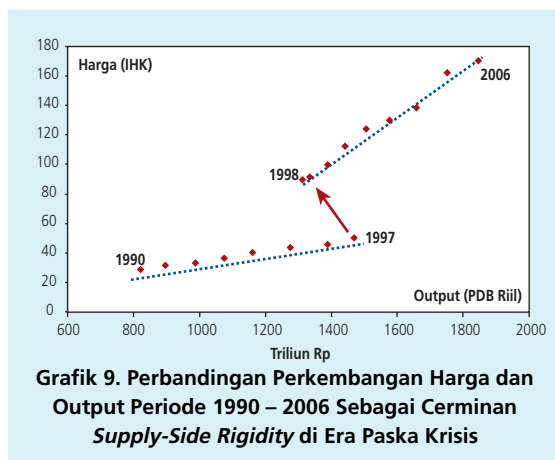
Dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia lainnya, risiko mikro dan distorsi di sektor riil tersebut telah menyebabkan efisiensi dan produktivitas perekonomian Indonesia yang lebih rendah. Hasil survei IMD di *World Competitiveness Report* pada tahun 2006 menunjukkan bahwa secara total, kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi dunia usaha dan infrastruktur Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara (Tabel 2). Sementara itu, hasil survei Bank Dunia tentang berbagai aspek yang mendukung investasi menunjukkan bahwa posisi Indonesia menurun ke posisi 135 di tahun 2006 dari posisi 131 di tahun sebelumnya.

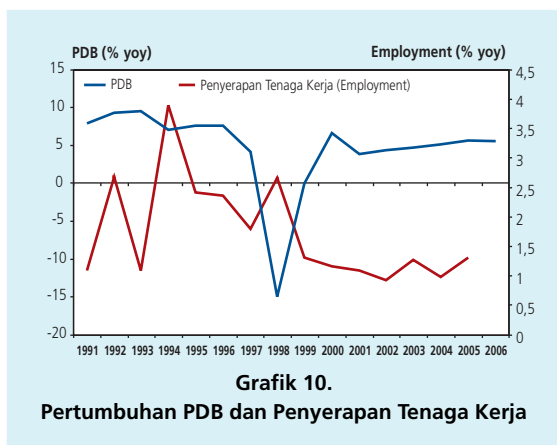
Tabel 2. Posisi Relatif Indonesia Dibanding Peer-Group Hasil Survei IMD (*World Competitiveness Report*)

Negara	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	26	28	29	24	31	19
India	42	41	50	34	39	29
Indonesia	46	47	57	58	59	60
Korea	29	29	37	35	29	38
Malaysia	28	24	21	16	28	23
Philippines	39	40	49	52	49	49
Singapore	3	8	4	2	3	3
Taiwan	16	20	17	12	11	18
# Countries	49	49	59	60	60	61



Dengan bergulirnya waktu, kombinasi dari semua permasalahan yang saya sebutkan tadi, menyebabkan akumulasi kapital dalam jangka panjang yang mencerminkan pula pertumbuhan investasi, menjadi stagnan dan porsi investasi dalam pembentukan PDB menjadi rendah (Lihat Grafik 8a), serta usia kapital dalam perekonomian menurun (Lihat Grafik 8b). Dampak dari akumulasi dan kualitas kapital yang rendah tersebut kemudian tercermin sebagai kekakuan sisi penawaran (*supply side rigidity*) dalam merespon stimulus perekonomian dari sisi permintaan. Hal ini secara ilustratif dapat kita lihat pada Grafik 9 yang menunjukkan dinamika harga dan keluaran (output) di Indonesia yang menunjukkan *slope* yang semakin tajam di era paska krisis. Artinya, upaya peningkatan output akan berdampak pada kenaikan harga dengan jumlah lebih besar. Akumulasi kapital yang rendah dalam perekonomian paska krisis selanjutnya





mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai dan rendahnya penyerapan tenaga kerja (Lihat Grafik 10). Kedua aspek terakhir ini jelas mempunyai dampak yang luas pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan kita meningkat dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar (Lihat Tabel 3).

Tabel 3. Gini Ratio

Daerah/Klpk Penduduk	2002	2003	2004	2005	2006*
40% terendah	20,92	20,57	20,80	20,25	19,20
40% menengah	36,89	37,10	37,13	35,05	35,08
20% teratas	42,19	42,33	42,07	44,70	45,72
Gini Ratio	0,290	0,320	0,320	0,340	0,345

Sumber : BPS
* perkiraan

Dilihat dari sisi yang berbeda, tingkat risiko mikro dan distorsi dalam perekonomian yang menghambat investasi terefleksikan pula pada semakin merenggangnya (*decoupling*) hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Perbankan menjadi enggan menyalurkan pembiayaan. Bank-bank dan para pemilik modal cenderung menempatkan dana di sektor keuangan pada instrumen-instrumen yang berisiko rendah, misalnya pada SBI dan SUN. Pembiayaan bank ke sektor riil menjadi sangat berkurang. Kita kemudian menghadapi *liquidity overhang* dalam bentuk SBI *outstanding* yang jumlahnya saat ini mencapai lebih Rp200 triliun. Ekonomi kita tumbuh tidak seimbang. Perekonomian kita hanya tumbuh dengan 1 mesin. *We are flying only with one engine*. Sektor riil cenderung

bergerak lambat karena risiko mikro struktural menghambat penyaluran dana perbankan, sedangkan sektor keuangan terus tumbuh membesar karena dana terus masuk ke dalamnya. Kondisi ini, apabila terus terjadi di waktu-waktu mendatang, tentu amat tidak sehat bagi daya tahan sistem keuangan dan perekonomian kita secara keseluruhan.

Sementara itu, tingkat risiko mikro dan distorsi dalam perekonomian yang menghambat investasi dan rigiditas sisi penawaran yang ditimbulkannya, menyebabkan perekonomian menjadi lebih rentan terhadap gejolak eksternal dan cenderung inflatoir. Sejak krisis hingga saat ini, laju inflasi inti kita masih persisten, pada level yang relatif tinggi. *Constraint* ini tentu berdampak pada suku bunga pembiayaan yang cenderung tinggi. Keseluruhan rentetan peristiwa tersebut menyebabkan *collective suffering* pada kita semua. Dengan melihat lebih dalam lagi kepada siapa sebenarnya yang paling banyak menanggung penderitaan ini, kita tahu dan kita akan dengan mudah berkata bahwa semua ini tidak dapat dibenarkan secara moral. Dengan demikian, keseluruhan argumen tersebut di atas ingin menegaskan kondisi bahwa koreksi pada distorsi, rigiditas struktural, dan iklim investasi merupakan faktor penentu bagi peningkatan pertumbuhan ke tingkat 'potensial' yang lebih tinggi dan bagi penurunan suku bunga dalam perekonomian ke tingkat yang lebih rendah secara 'natural' dan *sustainable*. Dan, dengan cara itulah pembangunan berkelanjutan dapat kita realisasikan.

Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,

Kondisi dan permasalahan di wilayah kehidupan ekonomi bangsa tersebut, kita sadari atau tidak, terus meluas menciptakan berbagai permasalahan lain dalam kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat. Saat ini, saya mengamati telah terjadi ketidakteraturan (*disarray*) kehidupan sosial masyarakat yang lebih condong untuk mendahulukan kepentingan kelompok yang lebih terbatas, dibandingkan kepentingan nasional yang lebih luas. Konsensus dan komitmen kebangsaan yang disepakati untuk menjadi pegangan semua pihak semakin terasa berkurang. Banyak di antara kita yang berusaha hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri, tanpa atau sedikit sekali koneksitasnya satu sama lain (*disconnected*) dalam kerangka pencapaian kepentingan bangsa. Dalam tata pergaulan global, ketika kita melihat bangsa lain yang terus bergerak maju, timbul kecemasan, ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan keterasingan (*sense of alienation*). Kita tak habis-habisnya memuji dan mendiskusikan keberhasilan yang mereka capai. Namun kita sendiri tetap tidak bisa berbuat banyak.

Di pihak lain, budaya kekerasan, idealisasi yang regresif, ekstrimisme dan intoleransi, serta etos kerja yang lemah nampak semakin mewarnai keseharian bangsa ini. Pranata politik yang tercipta di era paska krisis, baru sedikit sekali memberikan maslahat yang nyata memajukan kesejahteraan umum. Demokrasi yang sedang kita bangun masih belum memberi manfaat optimal untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.

Semua keadaan yang tidak menyenangkan itu menjadi semakin buruk, dengan terjadinya bencana alam yang terus menerus mendera negeri ini. Belum hilang penderitaan dari satu bencana, telah timbul bencana lain yang menambah pedihnya luka kita semua sebagai bangsa. Gempa bumi, tsunami, kemarau panjang, kebakaran hutan, lumpur panas, dan terakhir banjir serta tanah longsor, silih berganti menimpa berbagai wilayah di penjuru negeri. Kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah bencana terasa begitu menyedihkan, walaupun kita semua telah mencoba berbuat sesuatu untuk membantu meringankan beban mereka. Kami di Bank Indonesia telah meminta industri perbankan untuk dapat memberikan perlakuan khusus kepada kredit-kredit para pelaku usaha di seluruh wilayah tanah air yang terkena bencana. Kami berharap langkah ini akan dapat membantu mereka untuk dapat kembali bangkit membangun usahanya. Namun langkah ini masih jauh dari memadai.

Dalam keadaan seperti ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebuah semangat dari segenap elemen bangsa untuk berbagi keresahan dan harapan (*to share concern and hope*). Kita semua merasa galau dengan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kita perlu memikirkan adanya sebuah strategi kebudayaan yang dapat menyusun kembali konsensus dan komitmen bangsa, menyatukan kembali rasa keterkaitan kepentingan, menyirnakkan keterasingan, menempa kemandirian, dan membangun harapan-harapan. Kita boleh berharap bahwa inisiatif untuk menyusun strategi tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat madani dan kekuatan atau pilar-pilar demokrasi yang sudah ada. Sementara itu, kita semua harus bersatu padu, bahu membahu, dan bekerja lebih keras lagi untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah bangsa termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Hanya dengan cara demikian, harapan terjadinya perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa akan menjadi sebuah keniscayaan.

Dari aspek permasalahan ekonomi, kiranya kita semua sepakat bahwa koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi lain yang memiliki

kewenangan, keahlian yang *mumpuni* serta berbagai instrumen kebijakan yang sesuai sangat berarti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kebijakan moneter dan perbankan pasti tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang terkait dengan iklim investasi dan berbagai distorsi di pasar barang dan jasa yang menyebabkan biaya tinggi dalam perekonomian. Sebagai otoritas moneter dan perbankan, Bank Indonesia mempunyai keterbatasan, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun jangkauan instrumen kebijakan yang kami miliki.

Bank Indonesia sesuai dengan mandat yang diamanatkan UU kepadanya, hanya dapat memberikan sumbangsuhnya melalui upaya pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Pencapaian tentang hal inipun masih tergantung pada koordinasi dengan otoritas lain, kerjasama dengan berbagai pihak, dan bantuan serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Di bidang pengawasan perbankan, kami sadari bahwa perbankan kita masih mengidap banyak kekurangan, meskipun kondisinya sudah jauh lebih sehat, kokoh, dan *profitable* dibandingkan beberapa tahun lalu.

III. Outlook Perekonomian tahun 2007

A. Tahun 2007: Tahun Penentuan

Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,

Dengan memperhatikan seluruh kondisi dan dinamika perekonomian di 2006 lalu, tidak berlebihan kiranya jikalau saya mengatakan tahun 2007 adalah **a *defining moment***, tahun penentuan. Tahun dimana pemanfaatan stabilitas makroekonomi untuk meraih optimisme yang lebih besar pada kelangsungan pemulihan ekonomi negeri menjadi suatu keperluan yang sudah sangat mendesak.

Di tahun penentuan ini, proses perjalanan pembangunan bangsa tengah memasuki tahap yang kritis. Segala hasil yang kita capai pada tahun 2006, telah membawa perjalanan kita sampai pada pertengahan sebuah jembatan asa yang harus segera kita lalui dengan mengerahkan segala upaya dan keteguhan hati, namun tetap berhati-hati. Kalau kita mampu terus melangkah dan melintasi jembatan tersebut dengan selamat, maka harapan masa depan bangsa yang lebih baik akan terbentang luas. Namun apabila kita terpaksa harus berhenti, karena kita terus gamang dan kehilangan arah, maka jembatan asa akan runtuh karena terbebani oleh beratnya beban yang kita semua harus bawa. Kita akan kembali jatuh terpuruk, dengan berbagai permasalahan yang semakin berat.

Memasuki tahun 2007 ini, berarti kita memasuki pula tahun ke-10 (sepuluh) sejak kita dilanda krisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahun adalah sebuah kurun yang cukup lama bagi sebuah bangsa untuk berbenah dan memperbaiki diri. Kita perlu berkata pada diri sendiri bahwa *enough is enough!* Menunda-nunda lagi langkah hanya akan membuat bangsa ini semakin termarginalisasi dalam era persaingan antar-negara yang semakin tajam. Penundaan akan membuat kita digilas oleh waktu. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu untuk merebut kembali nasib melalui kerja keras dan kerja keras. Anda ingin sejahtera, hanya satu caranya, kerja keras! *There's no substitute for hard work!* Kerja keras adalah prasyarat kecukupan (*a sufficient condition*) bagi nasib yang lebih baik. Oleh karena itu tahun 2007 adalah saat yang tepat untuk kita bekerja lebih keras dan lebih terfokus dengan komitmen yang lebih besar. *It is now time to act because inaction can be fatal!*

Pernah dalam suatu kondisi tertekan di tengah pergolakan Perang Dunia Kedua, Sir Winston Churchill, berkata: "*We shall prevail*". Ungkapan ini relevan dengan kondisi bangsa kita. Tidak mungkin ada sebersit pun bayangan kekalahan, jika semangat, keyakinan dan harapan erat kita genggam. Boleh jadi krisis pada 10 tahun silam telah menghancurkan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Namun tidak demikian harapan-harapan hari depan kita sebagai bangsa. Tidak pernah dalam lembar sejarah bangsa kita menyerah karena masalah. Langkah demi langkah kita akan tempuh untuk bangkit, menegakkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang berdaulat.

Dalam pandangan Bank Indonesia, kondisi makroekonomi yang pada tahun 2007 ini diperkirakan masih tetap stabil, akan menjadi bekal utama bagi pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi jika faktor-faktor risiko mikro yang terkait dengan ekonomi biaya tinggi di sektor riil dapat ditekan dan iklim investasi membaik secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan berada dalam kisaran 5,7% – 6,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di 2005 dan 2006. Sebagai *baseline forecast* perekonomian diperkirakan akan tumbuh sebesar 6%(yoy) dengan berbagai alasan sebagai berikut. Pada semester I-2007, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagian besar akan bersumber dari konsumsi ditambah sedikit dengan yang berasal dari investasi swasta. Peningkatan konsumsi tersebut diperkirakan akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan daya beli masyarakat karena adanya kenaikan gaji PNS, peningkatan UMR di semester awal 2007 dan

inflasi yang terkendali pada laju yang rendah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin kuat pada semester II-2007 sejalan dengan perkiraan peningkatan signifikan pada investasi swasta dan peningkatan yang semakin besar pada belanja modal pemerintah. Perkiraan peningkatan investasi swasta baik berbentuk PMA maupun PMDN pada semester II-2007 ini, selain didorong oleh semakin kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek peningkatan perekonomian ke depan, juga disebabkan oleh kontribusi tren positif penurunan inflasi dan suku bunga, serta stabilitas pada nilai tukar.

Di sisi eksternal, kegiatan ekspor diperkirakan masih tumbuh tinggi meskipun cenderung melambat akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2006. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Melihat perkembangan ekspor terakhir yang terutama disumbang oleh komoditi berbasis sumber daya alam, kecenderungan penurunan harga komoditas dunia diperkirakan akan disikapi dengan peningkatan daya saing komoditas ekspor di sektor manufaktur. Beberapa komoditas yang diperkirakan dapat memberikan sumbangan terbesar antara lain adalah tekstil, peralatan listrik, produk kimia dan peralatan mesin.

Neraca Pembayaran Indonesia di 2007 diperkirakan masih akan mencatat surplus, meskipun tidak sebesar surplus pada tahun 2006 (Lihat Tabel 4). Penurunan surplus neraca pembayaran ini antara lain disebabkan peningkatan permintaan impor sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Dengan perkiraan ini surplus neraca transaksi berjalan 2007 diperkirakan sekitar 1,87% dari PDB. Dengan perkiraan neraca pembayaran tersebut, cadangan devisa di 2007 diperkirakan akan mendekati US\$47 miliar. Surplus neraca pembayaran, meningkatnya cadangan devisa, dan keyakinan pasar terhadap kualitas tata-kelola kebijakan

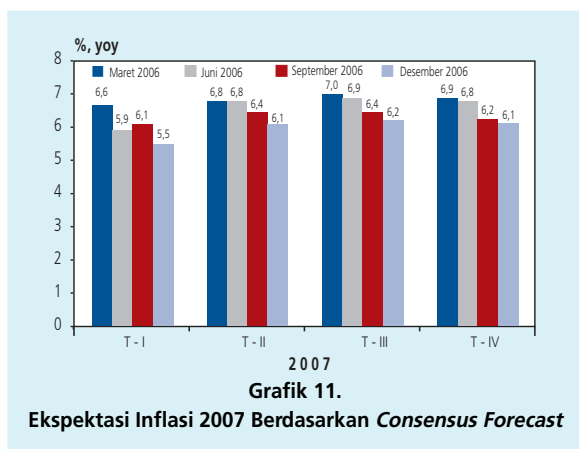
Tabel 4.
Perkembangan dan Outlook Neraca Pembayaran Indonesia

	2005	2006*	2007**
I. CURRENT ACCOUNT	0,11	2,73	1,87
II. CAPITAL & FINANCIAL ACCOUNT	0,10	-0,24	-0,41
III. OVERALL BALANCE	0,16	3,67	1,46
Memorandum Item:			
Reserve Assets Position (US\$ Million)	34.724	40.422	46.466
(In Months of Imports & Official Debt Repayment)	4,4	4,3	5,0
DSR (%)	17,3	24,6	19,3

Catatan : * Angka sementara, ** Perkiraan

makroekonomi pada gilirannya akan mendukung nilai tukar rupiah 2007 yang secara umum diperkirakan bergerak sesuai dengan keseimbangan eksternalnya.

Peningkatan kegiatan ekonomi di tahun 2007 diperkirakan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap harga-harga secara umum sehingga inflasi IHK diperkirakan masih dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama-sama yaitu $6 \pm 1\%$. Sementara itu, peningkatan permintaan diperkirakan masih dapat diimbangi perbaikan sisi penawaran sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap inflasi inti. Perkiraan inflasi IHK 2007 juga didukung oleh ekspektasi inflasi pelaku pasar yang masih terjaga (Lihat *consensus forecast* di Grafik 11) dan tidak adanya rencana untuk meningkatkan harga kelompok barang yang harganya diatur Pemerintah. Di samping itu, tekanan inflasi kelompok *volatile food* juga diperkirakan tetap rendah sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran pasokan makanan khususnya barang-barang kebutuhan pokok.



Namun perlu saya garis bawahi beberapa hal yang dapat mempengaruhi angka perkiraan perekonomian 2007. Pertumbuhan ekonomi 2007 berpotensi meningkat lebih tinggi jika implementasi beberapa agenda penting program Pemerintah di 2007 seperti perbaikan iklim investasi, penurunan distorsi dalam perekonomian, program pembangunan infrastruktur khususnya di bidang energi dan transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin dapat direalisasikan dengan lebih cepat. Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran atasnya sebesar 6,3% dengan investasi swasta, sebagai pendorong utama disamping konsumsi.

Kondisi sebaliknya dapat terjadi berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah hingga mencapai kisaran bawahnya sebesar 5,7% jika berbagai kendala dan risiko perekonomian (*downside risks*) tidak dapat diatasi. Kendala tersebut terkait dengan fleksibilitas kapasitas produksi dalam mengimbangi peningkatan permintaan, yang terutama disebabkan oleh iklim investasi yang belum membaik dan ekonomi biaya tinggi. Selain kendala tersebut, perkiraan perekonomian 2007 juga akan dipengaruhi kemampuan penyesuaian perekonomian domestik terhadap berbagai kemungkinan risiko perekonomian global yang dapat muncul di 2007, terutama yang terkait dengan *global financial flows*.

Skenario mana pun yang dalam perjalanannya akan menjadi kenyataan, peningkatan peran perbankan dalam mendukung sisi pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai perkiraan tersebut. Pada tahun 2007 pertumbuhan kredit diharapkan dapat mencapai 15%-18% dan terfokus pada sektor-sektor andalan utama dengan muatan impor rendah dan tidak bersifat padat modal, seperti di sektor dan sub-sub sektor pertanian.

Dalam hubungan ini, kapasitas dan kapabilitas bank-bank tertentu didalam menyalurkan pembiayaan yang selama ini terhambat, karena tingginya NPL harus dapat segera terselesaikan. Kita juga melihat bahwa berbagai proyek infrastruktur yang saat ini tengah diakselerasikan pelaksanaannya sangat membutuhkan peran pembiayaan perbankan, khususnya bank-bank BUMN. Jika dikerjakan dengan *sequencing* yang benar dan *pace* yang terukur agar tidak menimbulkan instabilitas makroekonomi, keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek ini diprediksi dapat menimbulkan *multiplier effect* yang cukup signifikan terhadap dinamika sektor lainnya.

Dengan perkiraan kondisi tersebut di atas, diharapkan *liquidity overhang* dan *undisbursed loan* yang saat ini jumlahnya cukup besar akan dapat mulai menurun pada tahun 2007 ini. Di pihak lain, pembiayaan di luar sektor perbankan yang meningkat akhir-akhir ini diperkirakan akan terus berlanjut untuk menambah daya tahan pemulihan ekonomi secara lebih *broad-based*. Terkait dengan hal ini, industri perbankan dihadapkan dengan persaingan yang semakin tajam, baik antar pelaku industri perbankan sendiri maupun dengan pelaku di luar sektor perbankan dalam penyediaan pembiayaan. Hal ini menuntut pelaku industri perbankan untuk berbenah diri agar dapat *survive* dalam persaingan tersebut.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2007

Dalam kaitan dengan perkiraan-perkiraan di atas, perlu saya tekankan kembali bahwa ekonomi biaya tinggi (EBT), distorsi dan struktur perekonomian yang kurang sempurna, serta iklim investasi yang kurang baik adalah permasalahan utama yang dapat menyebabkan masih lambannya pemulihan ekonomi secara lebih berimbang dan berdaya tahan di tahun 2007. Dari sisi Bank Indonesia, semua permasalahan tersebut membuat berbagai langkah yang kami lakukan untuk mencapai dan menjaga stabilitas makroekonomi menjadi lebih sulit. Perekonomian menjadi lebih rentan dan cenderung kurang mampu memitigasi berbagai gejolak (*shocks*) baik yang berasal dari domestik maupun eksternal. *Stance* kebijakan moneter cenderung menjadi ekstra hati-hati, terutama ketika terjadi gejolak tidak terduga (*unexpected shocks*) yang dapat meningkatkan risiko pencapaian stabilitas harga.

Dari sisi kepentingan bangsa yang lebih luas, kita tidak mungkin bisa menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara permanen dan berkesinambungan tanpa perbaikan-perbaikan struktural yang mengurangi biaya tinggi dalam perekonomian dan memperbaiki iklim investasi.

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa:

1. Dari sisi kebijakan moneter, penajaman implementasi *inflation targeting framework* (ITF) yang terintegrasi dalam kerangka kerja kebijakan makroekonomi yang lebih luas merupakan langkah strategis yang akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia demi menjaga keyakinan pasar akan stabilitas makroekonomi dalam jangka menengah panjang dan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berbagai dilema yang terkait dengan arus modal, nilai tukar, dan suku bunga dalam lingkungan kebijakan rezim devisa bebas dan nilai tukar mengambang, akan kami letakkan dalam konteks persoalan global yang lebih luas dan bagaimana respons kebijakan makro-moneter yang tepat untuk menyikapinya. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang memberi insentif bagi arus modal jangka panjang akan dikedepankan, ketimbang kebijakan-kebijakan yang menghukum arus modal jangka pendek. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pasar keuangan dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, kami juga melihat perlunya penyempurnaan kerangka operasional kebijakan moneter.
2. Dari sisi kebijakan sektor keuangan secara umum: Bank Indonesia melihat perlunya memperkuat kemampuan sistem keuangan dalam meredam gejolak

(*shocks*) perekonomian. Dalam kaitan ini, dan dengan melihat berbagai potensi gejolak di pasar global dan domestik dalam 1 sampai dengan 3 tahun kedepan, berbagai langkah kebijakan untuk lebih mengembangkan dan memperdalam sektor keuangan nasional perlu segera dilakukan di tahun 2007. Hal ini menuntut upaya bersama yang terkoordinasi yang melibatkan Bank Indonesia dan lembaga-lembaga Pemerintah, institusi perbankan — sebagai komponen besar di sektor keuangan — dan institusi-institusi keuangan non-bank.

3. Dari sisi kebijakan perbankan secara khusus: Bank Indonesia akan mengembangkan *indirect intermediation* oleh perbankan nasional ke sektor-sektor produktif melalui berbagai upaya untuk mendorong *universal banking* namun tetap dalam koridor konsolidasi perbankan. Berbagai upaya tersebut akan kami arahkan pula untuk mendorong proses pendalaman pasar keuangan nasional (*financial market deepening*).
4. Dari sisi Pemerintah: implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang lebih tajam untuk percepatan perbaikan kondisi risiko mikro di sektor riil melalui perbaikan iklim investasi secara keseluruhan, mutlak diperlukan di tahun 2007, termasuk percepatan perbaikan infrastruktur dan penyediaan energi yang lebih terjangkau pasokannya. Perlu pula dilakukan upaya yang lebih cepat dan menyeluruh untuk menghilangkan berbagai distorsi di pasar barang dan jasa agar biaya tinggi dalam perekonomian dapat segera menurun. Selain itu, tahun 2007 akan menjadi tahun yang baik untuk mengembangkan fokus sektoral dalam strategi dan implementasi pembangunan nasional jangka panjang, dengan penekanan yang lebih berimbang pada sektor-sektor dengan muatan input lokal tinggi dan bersifat padat karya.

Dengan catatan terakhir mengenai outlook perekonomian tahun 2007 tadi, ijinkanlah saya berikut ini untuk menguraikan beberapa pandangan saya tentang pokok permasalahan dan tantangan yang masih harus dihadapi oleh perbankan nasional tahun ini dan kedepan.

IV. Pokok Permasalahan dan Tantangan Perbankan Tahun 2007

Hadirin sekalian yang terhormat,

Sebelum kita membahas lebih fokus pada arah kebijakan industri perbankan ke depan, perkenankan saya mengajak kita semua untuk melihat pada sebuah gambaran permasalahan yang lebih luas. Malam ini saya tidak akan terlalu

dalam menyoroti masalah-masalah teknis yang bersifat mikro dalam industri perbankan, sebagaimana pidato-pidato saya selama 3 tahun berselang. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mencoba membawa pikiran dan pandangan Bapak-Ibu sekalian untuk turut memikirkan bagaimana fungsi dan peran industri perbankan seharusnya kita tempatkan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi bangsa.

Saya kira kita sepakat bahwa *ultimate target* pembangunan ekonomi yang ingin kita capai bersama di masa depan, adalah terwujudnya "Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berkualitas secara Berkesinambungan". Hanya dengan pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas, maka masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah riil di negeri ini dapat kita atasi bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sekali lagi, kita memerlukan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya kalangan perbankan nasional. Peranan perbankan menjadi sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian negeri. Oleh karena itu, kita memerlukan perbankan yang sehat, kuat dan berperan signifikan dalam pembiayaan perekonomian. Perbankan yang demikian akan memperkuat kemampuan perekonomian nasional dalam menghadapi berbagai gejolak sebagai akibat dari internasionalisasi dan pengintegrasian ekonomi secara global. Untuk itulah, dalam tiga tahun terakhir ini kebijakan Bank Indonesia senantiasa diarahkan untuk semakin memantapkan stabilitas sistem perbankan di negeri ini.

Upaya penguatan kelembagaan perbankan di satu sisi, dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan di sisi lainnya, bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang menjadi satu kesatuan. Hanya melalui perbankan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, kita dapat mencapai stabilitas sistem keuangan dan menjadikan perbankan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir ini, Bank Indonesia telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mencapai kedua hal tersebut, antara lain melalui peningkatan kualitas pengaturan dan pengawasan bank, meneruskan proses penyehatan individual perbankan, dan menyiapkan infrastruktur industri perbankan yang memadai.

Selama perjalanan waktu tahun 2004-2006, ada hal-hal yang semula diduga dapat segera kita selesaikan ternyata memerlukan waktu lebih lama dari seharusnya. Sebaliknya, ada beberapa hal yang diperkirakan memakan waktu lama, ternyata dapat dilaksanakan lebih cepat. Karena itulah, beberapa kali kami

melakukan penyesuaian kebijakan. Dalam proses penentuan kebijakan, tujuan akhir, yaitu menjadikan industri perbankan yang solid dan bermanfaat, adalah sesuatu yang secara konsisten harus kita tuju. Dalam prosesnya, instrumen-instrumen kebijakan dapat mengalami penyesuaian melihat pada situasi yang berkembang saat itu.

Proses pembenahan perbankan ini, bagi saya adalah sebuah proses sosial yang *continuous* dan dialektis, yang hanya dapat dipahami oleh kita semua secara dinamis. Banyak permasalahan dan tantangan yang telah kita lewati, namun lebih banyak lagi yang harus kita selesaikan, karena memang "*Life is a game of improvement, not a game of perfection*". Begitu pula halnya dengan proses perubahan perbankan. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila terdapat perubahan-perubahan dalam kebijakan, terutama ketika kondisi dan dinamika sekeliling kita menghendaknya. Meskipun demikian, kami tetap berpegang pada pedoman agar perubahan-perubahan tersebut haruslah dilakukan secara terukur dan hati-hati, tidak mengorbankan stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan, dan tetap konsisten dalam konteks mencapai tujuan.

Hal lain yang juga sangat penting dalam memasuki tahun penentuan ini, yaitu kita membutuhkan kehadiran sektor formal yang kuat dan mampu bergiat secara optimal. Penekanan terhadap sektor informal dan UMKM yang selama ini dilakukan, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan, seharusnya dipikirkan sebagai penyangga yang bersifat sementara. Benar bahwa kita perlu mendorong kedua sektor ini menjadi sektor formal yang kuat, besar dan mumpuni, serta bukan hanya berfungsi sebagai penyangga sosial. Akan tetapi, sektor industri formal yang sudah ada harus pula kita gerakkan untuk segera mendorong dirinya ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyerap sumber daya (manusia, keuangan, dan alam) yang menganggur dengan lebih besar lagi. Sungguh sangat disayangkan, sampai saat ini, perkembangan sektor formal ini tidak cukup signifikan untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Jumlah investasi yang ditanamkan pada sektor ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang besar.

Mungkin kita memang masih harus bersabar. Kita tahu, Pemerintah memiliki tekad yang kuat dan telah bekerja keras untuk menuntaskan segala hambatan iklim investasi. Akan tetapi, sementara kita menunggu dengan sabar realisasi investasi tersebut, kembali lagi, satu hal yang merisaukan banyak pihak, yaitu fungsi intermediasi perbankan yang bergerak sangat lambat. Kegundahan membayangi hati dan pikiran kami. Kenapa justru, ketika restrukturisasi industri

perbankan telah terlihat keberhasilannya, infrastruktur telah dilengkapi termasuk dengan hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan dan Biro Informasi Kredit, ketika kelembagaan bank telah semakin diperkokoh, serta di tengah kondisi ekonomi makro yang membaik, industri perbankan justru mengalami keraguan untuk memanfaatkan potensi yang ada di hadapannya. Pola operasional perbankan masih bersandar pada pembiayaan sektor konsumsi dan penempatan dana di pasar uang. Hal yang terakhir ini mencerminkan sebuah pola operasional yang tidak produktif dan karenanya tidak *sustainable*. Pola operasional yang terbatas tersebut pada dasarnya juga melenceng dari tujuan penguatan industri perbankan yang telah kita sepakati bersama yakni untuk menghadirkan industri perbankan yang efektif, efisien dan berperan dalam membantu perkembangan perekonomian Indonesia.

Permasalahan ini sungguh memerlukan perhatian kita semua untuk menyelesaikannya. Industri perbankan tentu tidak ingin dianggap *indifferent*, tidak peka, dan tidak serius di dalam memahami permasalahan bangsa. Terlepas dari masih adanya permasalahan di sektor riil yang masih belum dapat diselesaikan, seharusnya industri perbankan berusaha mendorong dan menjadi mesin penggerak utama untuk membuat terobosan, meningkatkan investasi yang akan mendorong geliat industri korporasi, untuk mengambil alih peranan konsumsi yang telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Itulah maksud utama dari berbagai upaya perbaikan yang telah kita lakukan dalam industri ini, yaitu agar perbankan mampu menjadi salah satu motor penggerak utama kebangkitan perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, industri perbankan perlu segera menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan intermediasi. Perbankan harus mampu mengubah pola operasional yang selama lebih dari 9 tahun terakhir menjadi andalannya, yaitu dari pembiayaan sektor konsumsi dan penempatan di pasar uang, kearah yang lebih produktif yakni pembiayaan modal kerja dan investasi. Kami bahkan meyakini bahwa jika perbankan mampu meningkatkan peran pembiayaannya hingga Rp. 150 triliun pada tahun 2007 terutama ke sektor infrastruktur dan kegiatan usaha yang bermuatan impor rendah dan bersifat padat karya, perekonomian akan mampu tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Dengan kata lain, perbankan dituntut untuk mampu dan mau membuka bahkan mencari peluang-peluang baru dalam pembiayaan. Tuntutan perekonomian saat ini membutuhkan upaya lebih dari industri perbankan untuk mau berkomunikasi dan lebih mengenali karakteristik dunia usaha yang ada di

sekitarnya. Dengan pengenalan yang lebih baik, saya meyakini bahwa masih tingginya persepsi risiko bank atas dunia usaha domestik akan dapat dikurangi secara drastis. Ada banyak industri di luar sana, yang menunggu uluran tangan perbankan. Sebut saja misalnya, industri pengolahan hasil laut, pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri-industri lainnya yang selama ini masih menganggap perbankan sebagai pihak yang kurang berpihak pada mereka. Disamping itu, saya juga menuntut industri perbankan untuk mampu menghadirkan inovasi dalam produk-produk pembiayaannya. Masalah pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana dalam jumlah besar seharusnya dapat dipecahkan melalui inovasi produk pembiayaan oleh perbankan sendiri. Pembentukan konsorsium dan sindikasi kredit juga dapat menjadi pilihan bagi bank untuk mengurangi eksposur risiko yang harus ditanggung dalam pembiayaan proyek-proyek dengan nilai yang relatif besar.

Oleh karena itu, di tahun 2007 ini para bankir saya tuntut untuk bekerja lebih keras, lebih inovatif dan lebih kreatif dalam mengemas paket-paket kredit dan dalam memikul risiko kredit secara bersama-sama. Bank Indonesia akan membantu Bapak-Ibu sekalian melalui berbagai langkah kebijakan pendukung yang akan saya uraikan pada kesempatan malam ini.

V. Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2007

Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,

Dalam nuansa tekad dan semangat untuk bangkit keluar dari permasalahan yang ada, perkenankan malam ini saya untuk menyampaikan beberapa pandangan dan pemikiran saya mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Bank Indonesia bagi proses pembangunan ekonomi bangsa. Pandangan saya ini akan terbagi dalam **8 (delapan)** butir arah dan strategi kebijakan yang akan ditempuh pada tahun-tahun mendatang.

Pertama, di waktu-waktu mendatang Bank Indonesia akan lebih aktif berperan menempatkan dirinya sebagai fasilitator dalam proses mendorong fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil. Di dalam memfasilitasi proses penyaluran pembiayaan perbankan, BI akan lebih aktif mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi serta mencermati secara lebih mendalam segala dinamika yang terjadi di sektor riil. Upaya ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya mencermati indikator makroekonomi. Berbagai pergerakan dan dinamika sektoral akan menjadi obyek yang dianalisis, dikaji, dan dipantau

secara rutin karena dari dinamika sektoral inilah antara lain indikator makro dipengaruhi.

Bagi saya, pemahaman BI tentang kondisi sektor riil yang selama ini dilakukan melalui proses penelitian, kajian, survey, hingga turun langsung ke lapangan melihat kondisi yang sebenarnya, perlu dapat pula dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, khususnya perbankan. BI berkeinginan untuk menjadikan dirinya sebagai Database Perekonomian Nasional sekaligus sebagai Pusat Informasi Kajian-kajian Ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Dalam konteks ini, selain dengan menyebarkan hasil kerja yang ada selama ini, BI akan melayani permintaan para *stakeholders*-nya, untuk melakukan kajian dan penelitian atas berbagai sektor usaha dan industri, termasuk UMKM, secara sendiri maupun berkolaborasi dengan perbankan. Inisiatif untuk menetapkan obyek penelitian di sektor-sektor usaha ditawarkan kepada pihak yang lebih membutuhkan atau berkolaborasi dengan BI sebagaimana biasa dilakukan. Dalam kerangka kerja seperti ini, wajar kiranya saya mengatakan bahwa industri perbankanlah yang seharusnya dapat memanfaatkan hasil kerja Bank Indonesia ini.

Dalam iklim desentralisasi dewasa ini, Bank Indonesia juga merasa terpenggil untuk mengambil peran dalam mendorong geliat dunia usaha di daerah. Dengan 37 kantor di ibu-kota propinsi dan kota-kota penting lainnya di Indonesia, kedekatan fisik Bank Indonesia dengan masyarakat di seluruh Indonesia ini akan kami maknai dengan meningkatkan peran dan fungsinya, serta membantu melakukan penelitian-penelitian ekonomi lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dimana kami berada.

Untuk itu, kami telah mengambil inisiatif perubahan dalam organisasi BI secara keseluruhan termasuk di dalamnya melakukan revitalisasi fungsi dan peran Kantor-kantor Bank Indonesia (KBI), termasuk kemungkinan pembukaan kantor baru di daerah-daerah yang karena pertimbangan perkembangannya membutuhkan dukungan KBI. Kemampuan kantor-kantor Bank Indonesia dalam memasyarakatkan hasil penelitian dan kajian mengenai dunia usaha akan semakin ditingkatkan. Disamping untuk menjalankan peran yang sifatnya generik tersebut, kemampuan KBI juga akan dipertajam agar mampu memahami permasalahan spesifik yang dihadapi di daerah dimana ia berada, lebih aktif dalam memberikan pendapat kepada Pemerintah dan pelaku ekonomi di daerah, berpikir dan berbuat untuk memecahkan permasalahan yang ada, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pegiat ekonomi di daerahnya.

Melalui langkah ini, Bank Indonesia selalu siap bekerja sama melayani dan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada dirinya, termasuk keahlian, kompetensi, data, informasi, serta seluruh sarana yang dimiliki. Kami juga terbuka untuk menempatkan tenaga-tenaga peneliti dari Bank Indonesia pada berbagai proyek penelitian ataupun penyusunan kebijakan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dengan berbagai kegiatan kerja sama ini, diharapkan hasil kerja Bank Indonesia akan dapat semakin terasa di dalam membantu memecahkan masalah bangsa dan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan para *stakeholders*-nya.

Kami menyadari bahwa fenomena desentralisasi yang hadir di tengah-tengah peningkatan laju globalisasi dan demokratisasi ekonomi menuntut sofistikasi pengelolaan ekonomi yang semakin tinggi. Saat ini, tanpa menanyakan kesiapannya, daerah telah secara langsung dihadapkan dengan persaingan global. Industri turisme di Bali misalnya, secara langsung bersaing dengan Phuket di Thailand. Industri manisan di Jawa Timur harus bersaing dengan industri yang sama di Cebu Philipina. Tanpa tingkat pengetahuan yang memadai mengenai kondisi persaingan dan berbagai tantangan yang dihadapi, serta *guidance* dalam menghadapi tantangan tersebut, bukan tidak mungkin pelaku industri di daerah akan mengalami kebingungan dan bahkan melangkah ke arah yang tidak tepat yang mungkin akan semakin memperlemah daya saingnya di pasar global. Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan membantu melakukan kajian-kajian sektor riil yang juga memperhitungkan keunikan daerah dan kewilayahan.

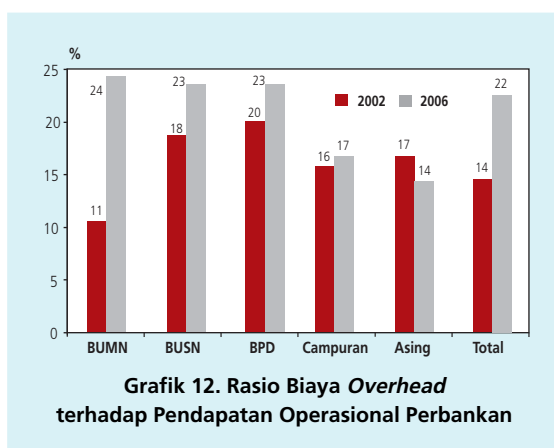
Strategi dan arah kebijakan **kedua**, yang akan kami tempuh pada tahun-tahun mendatang, adalah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menata kembali industri perbankan nasional melalui revitalisasi keberadaan dan pelaksanaan peran perbankan, terutama bank-bank BUMN.

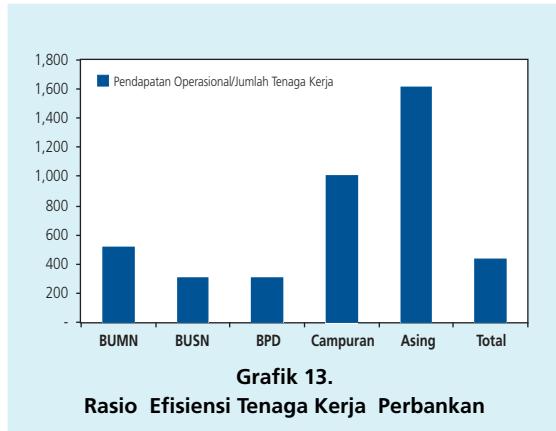
Kami sangat mendukung dan menyambut baik langkah-langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah untuk memperbaiki kinerja bank-bank BUMN ini. Dalam pandangan kami, revitalisasi peran bank-bank BUMN dalam industri perbankan nasional merupakan suatu langkah yang perlu segera diambil, terutama karena peran dan posisinya yang strategis dalam industri perbankan nasional. Saat ini, total asset bank BUMN mencapai 37% dari total asset industri perbankan dengan pangsa kredit yang hampir sama besar, yaitu 36%. Kita berharap banyak bahwa bank-bank BUMN akan mampu menjadi *lead* dalam mendorong fungsi intermediasi yang saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Di samping itu, kita juga bergantung kepada kekuatan dan kemampuannya didalam membiayai berbagai proyek pembangunan, yang terkait dengan hajat hidup rakyat banyak.

Namun dari perkembangan yang terjadi belakangan ini, kami melihat bahwa persaingan dalam industri perbankan untuk memperebutkan nasabah-nasabah potensial dengan *track record* yang baik sudah sedemikian sengitnya, sudah *neck to neck*. Yang menarik dan patut kita cermati adalah masuknya bank-bank milik asing, termasuk bank campuran, dalam kancah persaingan tersebut dengan segala kesiapan dan kelebihan pelayanan yang dimilikinya.

Tantangan persaingan dari bank-bank milik asing tersebut lambat laun akan menjadi faktor penting yang harus dicermati oleh bank-bank domestik, terutama bank-bank BUMN yang berada dalam *peer group* yang sama. Dari data yang ada, terlihat bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank milik asing mulai menunjukkan peningkatan.

Salah satu kekuatan utama dari bank-bank milik asing di dalam melakukan penetrasi pasar, ada pada tingkat efisiensinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank BUMN. Tingginya efisiensi pada bank milik asing ini tercermin jelas dari rendahnya rasio biaya *overhead* dibandingkan dengan biaya operasional, sehingga mampu menawarkan kredit dengan suku bunga yang lebih murah tanpa mengorbankan tingkat keuntungan (Lihat Grafik 12 dan 13). Efisiensi ini didukung pula oleh kredibilitas dan citra yang sangat baik, sehingga bank-bank asing ini mampu menghimpun dana dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah. Di pihak lain, tingkat efisiensi bank-bank BUMN saat ini relatif lebih rendah, terkait dengan berbagai beban dan biaya operasional yang harus ditanggungnya. Akibatnya, tingkat suku bunga bank-bank BUMN relatif lebih tinggi dibandingkan bank-bank milik asing dan menjadi *rigid* untuk diturunkan, karena akan dapat





menekan jumlah pendapatan mereka. Dengan kondisi seperti ini, terjadilah kesenjangan dalam *level of playing field* yang makin lama dapat terus makin melebar apabila tidak segera tertangani.

Tidak ada pilihan lain bagi bank-bank BUMN ini, kecuali berupaya mengejar level efisiensi bank-bank asing ini. Arah kebijakan dan strategi yang jelas harus segera ditetapkan. Berbagai permasalahan yang selama ini telah menyebabkan tingginya biaya *overhead* di kelompok bank BUMN harus dapat segera diselesaikan. Permasalahan NPL yang tinggi harus segera diselesaikan karena telah menjadi penyebab dari menggelembungnya beban biaya untuk mengadakan Penyisihan Penghapusan Aktiva. Peningkatan produktivitas SDM, efisiensi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya lainnya harus terus dilakukan agar tingkat efisiensi bank asing dapat juga dicapai oleh seluruh industri perbankan nasional.

Disamping itu, tingkat ukuran sebuah bank (*size of bank*) tentunya turut menentukan tingkat efisiensi yang hendak dicapai. Pertama, karena secara umum, bank yang lebih besar dapat memperoleh dana dengan harga yang lebih murah dibanding bank kecil. Kedua, karena bank yang lebih besar juga dapat memiliki *economies of scale* yang memadai yang memungkinkan mereka untuk membagi biaya operasinya dengan unit yang lebih besar. Bank-bank asing yang kebanyakan merupakan bagian dari industri perbankan multinasional tentunya memiliki kelebihan ini.

Dalam konteks ini, konsolidasi perbankan yang telah kami gaungkan sejak tahun 2005 menjadi sangat relevan untuk semakin digegaskan. Opsi dalam kebijakan kepemilikan tunggal (*Single Presence Policy*) yang telah kami keluarkan,

perlu menjadi perhatian kita semua. Kami berharap dengan pemilihan kebijakan dan strategi yang tepat, maka diharapkan bank-bank BUMN yang ada saat ini akan dapat menjadi bank yang besar, sehat, kokoh dan kuat, dan mampu berfungsi sebagai *flag carrier* perbankan Indonesia di dalam bersaing dengan industri perbankan global. Sementara itu, dalam hal masih dibutuhkan adanya bank-bank BUMN untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan, maka bank-bank ini harus mampu mencari dan memiliki *market niche* yang merefleksikan keunggulannya. Bank-bank BUMN ini harus memiliki *expertise* yang tidak mudah tersaingi, sehingga keberadaannya menjadi dirasakan dan dibanggakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masih dalam kaitan dengan proses konsolidasi industri perbankan yang telah kami canangkan sejak 3 tahun lalu, langkah *ketiga* yang kami lakukan pada tahun 2007 mendatang, adalah berupaya memfasilitasi proses merger diantara bank-bank yang dalam penilaian kami memerlukan arahan dan bantuan untuk menempuh proses ini. Pada bulan Oktober 2006 lalu kami telah mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang berisikan sejumlah insentif yang dapat diberikan dalam proses merger dan konsolidasi di industri perbankan. Insentif-insentif tersebut merupakan upaya optimal yang dapat kami berikan agar inisiatif industri perbankan melaksanakan proses merger tersebut dapat segera mengarah pada hasil yang kongkrit.

Namun apabila pada tahun 2007 ini, upaya mendorong proses merger tersebut, terutama yang ditujukan untuk mengurangi bank-bank yang berpotensi menimbulkan instabilitas pada industri secara keseluruhan tidak juga memperoleh respon yang positif, tampaknya kami harus terlibat secara lebih *decisive*. *Matchmaking process* dalam mencari *partner* yang sesuai diantara bank-bank tersebut, perlu difasilitasi secara lebih terarah dan pasti. Dari data dan informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang ada pada kami, kami akan mencoba merealisasikan sebuah institusi perbankan hasil merger yang lebih sehat, kuat, menguntungkan dan bermanfaat. Kesesuaian pola usaha, karakter bisnis usaha, target dan segmen pasar adalah aspek-aspek yang akan kami pertimbangkan secara mendalam dalam proses ini. Tetapi, tidak demikian halnya dengan aspek keperluan pemegang saham mayoritas atau pemilik bank. Kami akan sangat berhati-hati dan terukur dalam mengakomodasi kepentingan ini. Keseimbangan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain adalah hasil kesepakatan yang mutlak harus dicapai dalam proses ini. Para pihak tersebut harus mampu berbesar hati dalam menerima dan memberikan opsi-opsi kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sinilah, Bank Indonesia mencoba

mengambil peran dalam negosiasi yang mengacu pada prinsip-prinsip *honest brokering*, antara lain netral, wajar dan optimal.

Keseluruhan proses tersebut akan melibatkan fungsi kami sebagai pengawas dan juga sebagai pengatur dalam industri perbankan. Para pengawas Bank Indonesia, akan memulai proses ini sesegera mungkin. Untuk itu, mohon kiranya Bapak-Ibu sekalian selaku pemilik bank dapat terbuka untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Saya berpendapat bahwa lebih baik pembenahan perbankan kita lakukan sedini mungkin, dibandingkan apabila kondisi dan nilai menurun karena berubah status menjadi Bank dengan Kegiatan Terbatas (BKT).

Selanjutnya, langkah **keempat** yang akan kami ambil pada tahun 2007 mendatang, adalah langkah yang kembali terarah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan yang menjadi pokok permasalahan industri perbankan kita dewasa ini. Tidak kurang dari 7 Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan selama kurun waktu 2 tahun terakhir untuk memberikan ruangan yang cukup luas bagi industri perbankan di dalam menjalankan fungsi utamanya ini. Saya berkeyakinan bahwa Bapak dan Ibu sekalian sangat memahami tugas kami di dalam memelihara stabilitas moneter maupun perbankan. Di satu pihak, kami berupaya untuk selalu peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan di dalam upayanya membiayai pembangunan. Namun di pihak lain, kami juga tidak ingin melihat kemudahan dan kelonggaran yang kami berikan merusak seluruh pencapaian yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang hati-hati adalah kata kunci untuk tidak mudah terjerumus pada permasalahan.

Terkait dengan karakteristik industri yang seperti ini, kami berupaya agar setiap langkah kebijakan yang kami ambil dapat mencapai keseimbangan yang optimal (*striking the optimal balance*) antara besarnya risiko yang terkandung dan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, kebijakan mendorong fungsi intermediasi yang akan kami ambil kali ini tidak sepenuhnya bersifat relaksasi. Namun dalam pandangan kami lebih sesuai untuk dikatakan sebagai kebijakan untuk memfasilitasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengkaji kemungkinan perbankan untuk membiayai sektor-sektor tertentu, misalnya pertanian, yang selama ini kurang diminati oleh perbankan; di mana pangsa kredit pertanian saat ini sangatlah kecil, yakni sekitar 5,3% dari portofolio kredit perbankan. Tanpa pengaturan khusus, sektor pertanian akan tetap sulit berkembang, padahal sejak

dahulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Saat ini pun, ada 10 komoditi pertanian yang unggul dibanding negara lain, dengan memberikan kehidupan yang banyak kepada penduduk dan menghasilkan devisa yang cukup, sehingga fokus ke bidang pertanian adalah sebuah keniscayaan, paling tidak untuk beberapa saat setelah nanti melangkah pada pertanian dalam pengertian yang luas. Kita juga perlu mempertimbangkan pengembangan pertanian itu dalam konteks *backward and forward linkage*. Karena itu, kemitraan petani mikro dan kecil dengan perusahaan menengah/besar yang telah mapan merupakan persyaratan utama, agar tidak semata-mata meningkatkan produksi tapi dikaitkan dengan peluang bantuan teknis, pemasaran, serta pemenuhan eligibilitasnya dalam mengakses kredit.

Kebijakan-kebijakan yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat ini, ada yang memang akan mengubah isi PBI tertentu, dan ada pula yang hanya akan berupa surat penegasan atas penafsiran beberapa ketentuan yang pernah kami keluarkan di waktu lalu. Kami merasa bahwa cukup banyak ketentuan yang memerlukan kesamaan penafsiran dan pemahaman atas substansi yang ingin dicapainya. Beberapa ketentuan yang akan kami sesuaikan isinya dan/atau kami perjelas penafsirannya tersebut, antara lain terdiri dari:

1. **Ketentuan Mengenai Tata Cara Penilaian Kolektibilitas Kredit.** Selama ini tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang nilainya lebih dari Rp. 500 juta harus didasarkan pada 3 (tiga) pilar kriteria, yaitu prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan/ketepatan membayar. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan penilaian kolektibilitas, seperti: kewajiban penyampaian laporan hasil audit oleh akuntan publik, perusahaan baru yang mengalami kerugian harus digolongkan non-lancar, dan adanya kriteria prospek industri yang dirasakan memberatkan perbankan. Dalam waktu dekat, beberapa aturan dan persyaratan tersebut akan kami tinjau kembali, dengan arah penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Penilaian aktiva produktif yang bernilai sampai dengan Rp. 5 milyar, dapat dilakukan cukup dengan hanya mengacu pada 1 dari ke-3 pilar tersebut, yaitu kriteria ketepatan membayar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempermudah perbankan di dalam proses penyaluran kredit kepada nasabah-nasabah UMKM potensial, yang masih membutuhkan dukungan perbankan untuk bangkit dan mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Bagi perbankan sendiri, cara penilaian ini akan dapat memperbaiki kondisi kolektibilitas debitur-debitur yang karena kriteria 3 pilar penilaian kredatnya

tergolong non lancar. Adanya perbaikan kolektibilitas karena pelonggaran kriteria ini juga akan mengurangi beban pembentukan penyisihan aktiva karena adanya NPL. Biaya perbankan pun akan dapat ditekan, sehingga pada akhirnya suku bunga kredit dapat diturunkan lagi. Bagi masyarakat, kami memperkirakan sektor UMKM adalah sektor yang akan dapat langsung memanfaatkan kemudahan ini. Namun, perlu kiranya kami ingatkan, berbagai kemudahan yang ada tidak harus mengurangi penerapan *risk management* dan prinsip kehati-hatian Bapak-Ibu sekalian dalam menyalurkan kredit. Integritas dan profesionalisme serta *governance* pelaku industri perbankan di dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, merefleksikan sepenuhnya kualitas dan kompetensi Bapak-Ibu sekalian dalam memikul tanggung jawab yang diberikan. Dan kita semua sadari, di sinilah sebenarnya ketangguhan dan kekokohan industri perbankan berpijak.

- b. Pengecualian terhadap penerapan 3 pilar kriteria penilaian tersebut, diberikan pula bagi pembiayaan kepada debitur/proyek yang memperoleh jaminan Pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 7/2/PBI 2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum. Dengan pengecualian ini, proyek-proyek pembangunan yang dijamin oleh Pemerintah dapat dengan mudah memperoleh pembiayaan dari industri perbankan. Konsorsium untuk pemberian kredit sindikasi pun akan lebih sederhana dalam proses dan pembentukannya, karena memiliki rambu-rambu risiko yang jelas dan terukur.
- c. Pemberian tekanan yang lebih dititikberatkan pada kemampuan *risk management* perbankan untuk proses pemberian dan penilaian kredit, dibandingkan dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang bersifat *secondary qualifications*. Berbagai persyaratan penilaian kolektibilitas yang saat ini dirasakan memberatkan perbankan akan dapat dikesampingkan, sepanjang perbankan memahami benar *exposure* risiko yang dimilikinya dan siap dengan berbagai langkah mitigasi yang diperlukan.

2. Penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang terkait dengan Prinsip-Prinsip Kehati-hatian Perbankan, yang antara lain akan dilakukan dengan:

- a. Kenaikan batas nilai aktiva produktif dalam penerapan *uniform classification* dari yang saat ini hanya sebesar Rp. 500 juta menjadi Rp. 5 milyar dan atau cukup untuk 50 debitur terbesar bank.

- b. Penambahan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang diatur saat ini dengan antara lain memasukkan mesin-mesin, dan resi gudang, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan Undang-Undang.
- c. Penegasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar 30% dari modal bagi BUMN-BUMN yang bergerak di berbagai sektor pembangunan. Saat ini dikesankan oleh industri perbankan bahwa BUMN yang dapat memperoleh BMPK sebesar 30% hanyalah BUMN yang terkait dengan infrastruktur. Ke depan, BMPK sebesar 30% ini akan diperluas tidak hanya untuk BUMN yang terlibat infrastruktur, namun mencakup pula BUMN yang terlibat pembangunan di sektor-sektor lainnya.
- d. Penegasan dan penjelasan kembali mengenai pengertian pihak terkait dalam BMPK untuk pembiayaan bersama (*joint financing*) dari beberapa perusahaan (termasuk bank) terhadap suatu proyek yang sama. Harus dipahami bahwa hubungan keuangan dari suatu perusahaan dalam *joint financing* tidak berarti harus diartikan sebagai hubungan pengendalian. Dengan demikian, hubungan dalam *joint financing* tidak digolongkan sebagai pihak terkait, sepanjang tidak ada hubungan pengendalian lainnya.
- e. Penegasan bahwa masih dimungkinkannya pemberian kredit kepada debitur bermasalah yang bukan disebabkan tidak adanya itikad baik dari debitur tersebut. Sepanjang kredit bermasalah terjadi karena alasan-alasan diluar kemampuan debitur, maka terbuka kemungkinan debitur tersebut memperoleh lagi kredit baru, dengan tetap memperhatikan analisis yang komprehensif atas kelayakannya.

Keseluruhan langkah yang bersifat penyesuaian dan penegasan kembali tersebut diharapkan akan dapat segera mengakselerasikan seluruh fungsi intermediasi industri perbankan yang selama ini terhambat. Pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan benar terhadap ketentuan yang berlaku, seyogyanya akan melandasi setiap langkah strategis kita dengan argumen yang logis dan proporsional, tanpa harus mempersepsikan adanya upaya pemeliharaan kestabilan secara berlebihan.

Terkait dengan ini, secara internal Bank Indonesia juga terus akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan para pengawas kami di dalam melihat, memahami dan menafsirkan substansi dan *exposure* risiko yang ada. Dengan demikian, kesenjangan persepsi dan pemahaman mengenai rambu-rambu kehati-

hatian dalam menilai sebuah keputusan kredit diantara pengawas dan yang diawasi dapat diminimalkan.

Harapan kepada sektor perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi tentunya juga tertuju kepada perbankan yang berada dibawah kepemilikan asing. Sejak tahun 2006, tantangan ini tampaknya telah secara positif dijawab oleh bank yang berada dibawah kepemilikan asing ini. Karenanya peningkatan pemberian kredit ke sektor-sektor produktif oleh bank-bank dibawah kepemilikan asing adalah fakta yang sangat menggembirakan. Untuk menjaga kesinambungan momentum yang baik ini, kami telah menyiapkan langkah kami yang *kelima* di tahun-tahun mendatang, yaitu memberikan *guidance* sehingga bank asing dapat berkontribusi lebih optimal dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya kegiatan usaha bank asing di Indonesia dapat bergerak secara lebih terarah pada hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi negara tempat ia melebarkan kegiatan usahanya. Terlebih lagi saat ini dengan posisinya yang memang hampir mendominasi kepemilikan bank di Indonesia. Tidak berlebihan jika kami mengharapkan bank-bank di bawah kepemilikan asing, sebagai bagian dari industri perbankan nasional, untuk semakin meningkatkan komitmennya dalam berperanserta mendukung pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Di samping itu, meningkatnya kepemilikan asing pada industri perbankan di Indonesia meningkatkan *concern* akan masalah kesempatan kerja bagi tenaga profesional dalam negeri. Tingginya angka pengangguran di Indonesia saat ini meminta kami untuk menuntut Bank Asing memikirkan, turut bahu membahu mengatasi permasalahan ini. Terlebih lagi, kekhawatiran akan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal semakin meningkat sejalan dengan terus meningkatnya keberadaan asing di industri perbankan Indonesia. Sebagaimana janji kami di tahun 2006 lalu, masalah ini akan kami tangani dalam sebuah kebijakan khusus yang bertujuan untuk membatasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di level *middle management*, yaitu 2 (dua) tingkat dibawah Direksi, kecuali untuk bidang-bidang yang dapat dibuktikan memang tidak mampu diisi oleh pasar tenaga kerja domestik, karena *expertise* yang memang langka dan dibatasi untuk jangka waktu maksimal 3 tahun. Dalam jangka waktu ini, kami akan mengharuskan bank-bank yang memanfaatkan TKA di level menengah telah dapat melaksanakan *transfer of technology* kepada tenaga lokal.

Langkah *keenam* yang akan kami tempuh pada beberapa waktu ke depan adalah mencoba secara lebih proaktif mengambil peran di dalam mengembangkan pasar dan instrumen keuangan. Sebagaimana telah sedikit saya singgung di atas,

daya tahan pemulihan perekonomian kita ke depan menuntut sektor keuangan nasional yang selain kuat dan sehat, juga dalam (*deep*) agar dapat secara efektif memitigasi dampak gejolak di pasar keuangan global pada perekonomian secara keseluruhan. Namun terdapat implikasi lain dari pasar keuangan yang dangkal saat ini, terutama di tengah risiko mikro yang masih tinggi. Implikasi tersebut adalah terhambatnya proses pembiayaan perekonomian untuk pembiayaan investasi jangka panjang.

Masih terbatasnya produk-produk keuangan dengan maturitas dan risiko yang terdiversifikasi dengan baik serta pasar primer dan sekunder yang menopang perdagangannya membuat sebagian terbesar dari arus modal masuk dan eksekusi likuiditas dari sumber domestik terkonsentrasi di pasar SBI dan saham untuk penanaman modal jangka pendek. Konsentrasi penanaman modal yang seperti ini menyebabkan perekonomian di sektor riil hanya ditopang oleh konsumsi yang bersumber dari *wealth effect* di sektor keuangan.

Sementara itu, kondisi *liquidity overhang* dalam sektor finansial kita saat ini, terutama di sektor perbankan, sudah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan karena perbankan akhirnya terfokus pada kegiatan-kegiatan finansial yang bersifat jangka pendek, terutama di pasar deposito jangka pendek dan di pasar SBI, tanpa menyalurkan kredit untuk investasi.

Menyikapi persoalan di atas, saya melihat bahwa kebijakan pengembangan pasar keuangan domestik dan perluasan produk-produk finansial dapat menjadi satu langkah strategis yang mendukung proses pembiayaan untuk investasi yang pada gilirannya dapat mengurangi *liquidity overhang*. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik dan memperluas produk-produknya antara lain melalui kebijakan-kebijakan untuk penerbitan SPN dan mendorong perluasan pasar SBI ke yang berjangka lebih panjang, menyediakan *regulatory environment* yang efektif bagi pengembangan produk dan pasar yang lebih luas, mencakup *medium term notes*, *corporate bonds* dan *commercial papers*, serta memberi peluang yang lebih besar bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekuritisasi asset, *universal banking* dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah. Tentu semua langkah ini memerlukan upaya bersama dari Bank Indonesia, Pemerintah, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Bank Indonesia akan mengupayakan agar perluasan dan pengembangan perbankan dalam pasar keuangan tersebut akan dapat terakomodasikan dalam rencana perubahan UU Perbankan yang akan segera dilakukan dalam waktu-waktu mendatang.

Langkah **ketujuh** terkait dengan pengembangan perbankan syariah. Melihat pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air, Bank Indonesia memandang perlu untuk mempercepat pertumbuhan tersebut agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Kami memproyeksikan total asset perbankan syariah yang saat ini baru mencapai 1,5% dari total asset perbankan akan dapat meningkat menjadi setidaknya 5% pada akhir tahun 2008. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan program akselerasi perbankan syariah yang secara efektif akan dilaksanakan mulai tahun 2007. Program akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia akan dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu:

Pertama, melalui program sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat secara lebih intensif. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan dan perbankan syariah. **Kedua**, kami akan mendorong pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet pelayanan sehingga dapat lebih menjangkau kebutuhan masyarakat. Dan **ketiga**, Bank Indonesia akan lebih berperanserta secara aktif dalam mendukung masuknya dana investasi luar negeri melalui instrumen-instrumen keuangan syariah.

Melalui ketiga hal tersebut, perbankan syariah harus dapat kita jadikan sebagai sebuah kebanggaan bersama. Perbankan syariah bukan sesuatu yang marginal, tetapi sesuatu yang besar, dengan jangkauan dan kualitas pelayanan yang sama baiknya dengan perbankan konvensional. Pelayanan dan produk-produk perbankan harus diminati dan dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Intinya, dengan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat akan tercipta *real and effective demand* yang semakin besar dari masyarakat.

Dalam konteks ini, saya ingin mengajak Saudara sekalian untuk ikut aktif dan bersama-sama bekerja keras dan meningkatkan integritas, sehingga keberadaan perbankan syariah yang semakin berkualitas dan berperan dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai. Kesamaan visi dari semua *stakeholders* menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan efisien, mengingat hal tersebut menyangkut persamaan persepsi tentang bagaimana industri perbankan syariah dapat memposisikan dirinya sebagai penyedia solusi. Pada gilirannya, kondisi tersebut akan menimbulkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dari masyarakat terhadap perbankan syariah.

Hal **terakhir** yang tidak kurang penting artinya, yang akan kami tempuh pada tahun 2007 ini adalah terkait dengan keberadaan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat kecil yang bergerak di sektor usaha informal.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa sektor usaha informal ini adalah fakta yang ada dan nyata menyangga kehidupan sebagian besar kehidupan masyarakat kita. Bahkan, saya dapat mengatakan bahwa, sektor inilah yang sebenarnya merupakan *social safety net* yang membuat masyarakat kita masih memiliki mimpi, harapan dan optimisme untuk terus bertahan dalam perjalanan kehidupan mereka. Para petani kecil di pedesaan, pedagang di pasar-pasar tradisional, penjual rokok, pedagang warung kelontong dan banyak lagi jenis lapangan usaha yang termarginalkan oleh keadaan, justru merupakan segmen terbesar dalam masyarakat kita. Dan apabila kita ingin mengangkat derajat kehidupan masyarakat ke tingkat yang lebih baik, tidak bisa tidak, sektor inilah yang harus mendapat perhatian pertama. Mereka saat ini ada di barisan belakang, dan kini saatnya untuk kita tempatkan di depan dalam penetapan kebijakan-kebijakan kita: ***Putting the Last First***.

Pemahaman mengenai dinamika kehidupan masyarakat kecil inilah yang harus didefinisikan dalam konteks hubungannya dengan BPR. Hampir tidak mungkin pembiayaan kepada sektor usaha informal tersebut diproses dengan tatacara, ukuran dan kriteria seperti bank umum. Kami melihat bahwa proses penyaluran kredit kepada sektor informal ini memerlukan pendekatan dan strategi tersendiri yang memang sesuai dengan kondisi dan kebiasaan sosial setempat, tanpa mengurangi arti penting pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip kehati-hatian yang diterapkan pun berjalan pada koridor yang mencirikan karakteristik pasar yang dilayaninya. Kalau *track record* pencatatan nasabah di bank umum dapat diperoleh dengan mekanisme standar, maka pencatatan *track record* nasabah atau calon nasabah di BPR dapat memanfaatkan sistem sosial yang selama ini telah berlangsung dalam masyarakat. Hal ini terdukung oleh fakta empiris, bahwa lokasi BPR berada di sekitar para nasabahnya, bahkan para pegawainya pun direkrut dari kalangan mereka. Sejak awal harus kita sadari bahwa ukuran usaha BPR yang relatif kecil dan berada dilingkungan sosial yang lebih spesifik dan terbatas seharusnya merupakan *competitive advantage* BPR dibandingkan bank umum. Oleh karena itu, tidak selamanya BPR yang maju berarti harus mampu beroperasi seperti bank umum.

Karena itu, ke depan akan dikaji pengaturan untuk pengembangan BPR dalam rangka peningkatan peran dan kontribusinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga diharapkan BPR akan tetap diminati UMK dan masyarakat pedesaan, serta tidak kalah sigap dibanding LKM lain dalam memahami kebutuhan masyarakat. BPR dan LKM yang berfungsi baik harus menyebar ke seluruh Nusantara.

Indonesia mempunyai lebih dari 60.000 desa tetapi pelayanan bank formal hanya dapat menjangkau kurang dari 10.000 lokasi, sehingga perluasan jangkauan penyebaran BPR dan LKM pada umumnya adalah jawaban konkret atas kebutuhan UMK dan masyarakat pedesaan pada umumnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan BPR adalah melaksanakan *linkage program*, yaitu penerusan kredit UMKM dari bank umum atau bank syariah kepada BPR/BPR syariah, sehingga tercapai efisiensi dan sinergi, tetapi tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan semua itu, arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia adalah berupaya mengarahkan kembali peran, fungsi dan pola operasional BPR kepada khitahnya yaitu melayani masyarakat kecil, terutama yang berada di sektor informal dan berada di pelosok pedesaan. Peran BPR yang semula ditujukan untuk mengisi kebutuhan pembiayaan masyarakat kecil yang di waktu lalu lebih banyak dilayani oleh sektor keuangan informal, harus kembali diberdayakan. Hubungan BPR sejauh mungkin harus dapat menggantikan peran sektor keuangan informal, tetapi harus bersifat komplementer terhadap lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya dalam melayani masyarakat kecil.

Sementara itu, seiring dengan berkembangnya BPR, isu lain yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro lain yang menghimpun dana masyarakat dan berpraktek seperti bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal Tamwiil (BMT), Badan Kredit Desa (BKD), maupun Lembaga Pembiayaan Desa (LPD). Jumlah keseluruhan lembaga tersebut mencapai lebih dari 10.000 unit. Di satu sisi, beragamnya jenis dan variasi lembaga keuangan di luar lembaga bank umum maupun BPR tersebut menjadi sebuah alternatif yang memperkaya pilihan para pelaku UMK dan masyarakat pedesaan. Karakteristiknya yang khas dan memiliki kedekatan dengan masyarakat pedesaan, membuat berbagai LKM tersebut bertahan dalam kehidupan masyarakat. Namun di lain sisi, keberadaan LKM tersebut menyimpan beberapa permasalahan, seperti belum jelasnya jenis, bentuk, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya membuat perlindungan terhadap stakeholders dan lembaga itu sendiri menjadi lemah. Hal itulah yang perlu menjadi perhatian kita semua para pegiat ekonomi yang memiliki kepedulian pada pengembangan UMKM. Oleh karenanya, ke depan, pengaturan terhadap berbagai LKM itu perlu dipertegas.

Terkait dengan hal tersebut, dan juga dengan telah dicanangkannya Tahun Kredit Mikro dua tahun lalu, seyogyanya kita menggagas diri untuk mematangkan Rencana Undang-undang LKM menjadi Undang-undang, yang sudah kami inisiasi sejak 2001. Saya kira, hal ini perlu mendapat dukungan kita bersama.

VI. Penutup

Hadirin sekalian, pimpinan perbankan yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Melihat pada permasalahan dan tantangan yang kita hadapi, kita semua menyadari bahwa tahun-tahun ke depan tidaklah lebih mudah dari tahun-tahun yang telah berlalu. Berbagai langkah untuk mencapai keberhasilan kebijakan, baik itu kebijakan Pemerintah maupun Bank Indonesia, akan sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaannya nanti.

Untuk itu, kami akan selalu terbuka pada semua masukan dan kritik atas kebijakan yang kami keluarkan. Selama ini kita telah memiliki beberapa forum informal, seperti *breakfast meeting* dengan perbankan, *chief editors meeting* dengan media massa, yang merupakan sebuah forum yang terbuka untuk diskusi atas berbagai isu. Keberadaan forum-forum seperti itu saya harapkan dapat mengurangi terjadinya polemik dan perbedaan yang mencuat di media massa, dan pada gilirannya justru membingungkan publik.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa menghadapi tantangan ke depan, kita membutuhkan partisipasi dari segenap elemen masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat pers. Kompleksnya permasalahan kita, memerlukan keberadaan orang atau lembaga yang tak henti-hentinya risau dan tampil mengingatkan. Disinilah peranan dan kontribusi pers menjadi sangat penting. Pers adalah mereka yang selalu berada pada arus kerisauan untuk terus mempertanyakan. Pers memiliki peranan strategis dalam membangun infrastruktur sosial bagi demokrasi dengan senantiasa peka, memberikan perhatian, dan saling mengingatkan pentingnya prinsip dan tujuan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jurnalisme yang mencerahkan pandangan kita adalah sebuah kunci penting bagi masyarakat, khususnya bagi kami para pengambil kebijakan publik. Ulasan yang konstruktif dari masyarakat pers tentang pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita dengan penjelasan-penjelasan yang akurat dan obyektif akan

mempermudah keseluruhan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang ada di depan perjalanan kita. Untuk itu, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada masyarakat pers yang selama ini telah membantu kita semua memperoleh informasi yang mencerahkan. Saya berharap, pers dapat terus konsisten dalam memperjuangkan misinya untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Semoga kerjasama yang sudah sangat konstruktif selama ini juga dapat berlanjut terus ke depan.

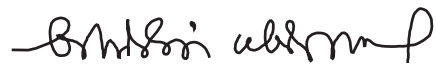
Akhirnya, marilah kita semua bekerja keras dan bekerja sama dalam semangat saling mendukung untuk membawa bangsa ini di persimpangan jalan, menuju ke cakrawala harapan baru yang lebih baik.

Begitulah seharusnya sikap kita dalam memandang tahun 2007 ini. Kita harus berjuang terus menyelesaikan masalah bangsa. Perbankan nasional di satu sisi akan terus membenahi dan menata diri untuk mengembalikan perannya sebagai lembaga intermediasi yang signifikan. Di sisi lain, Bank Indonesia akan secara konsisten dan disiplin mengawal langkah perbaikan tersebut.

Sekali lagi, Selamat Tahun Baru 2007. Kita yakin bahwa Allah SWT senantiasa bersama kita untuk meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

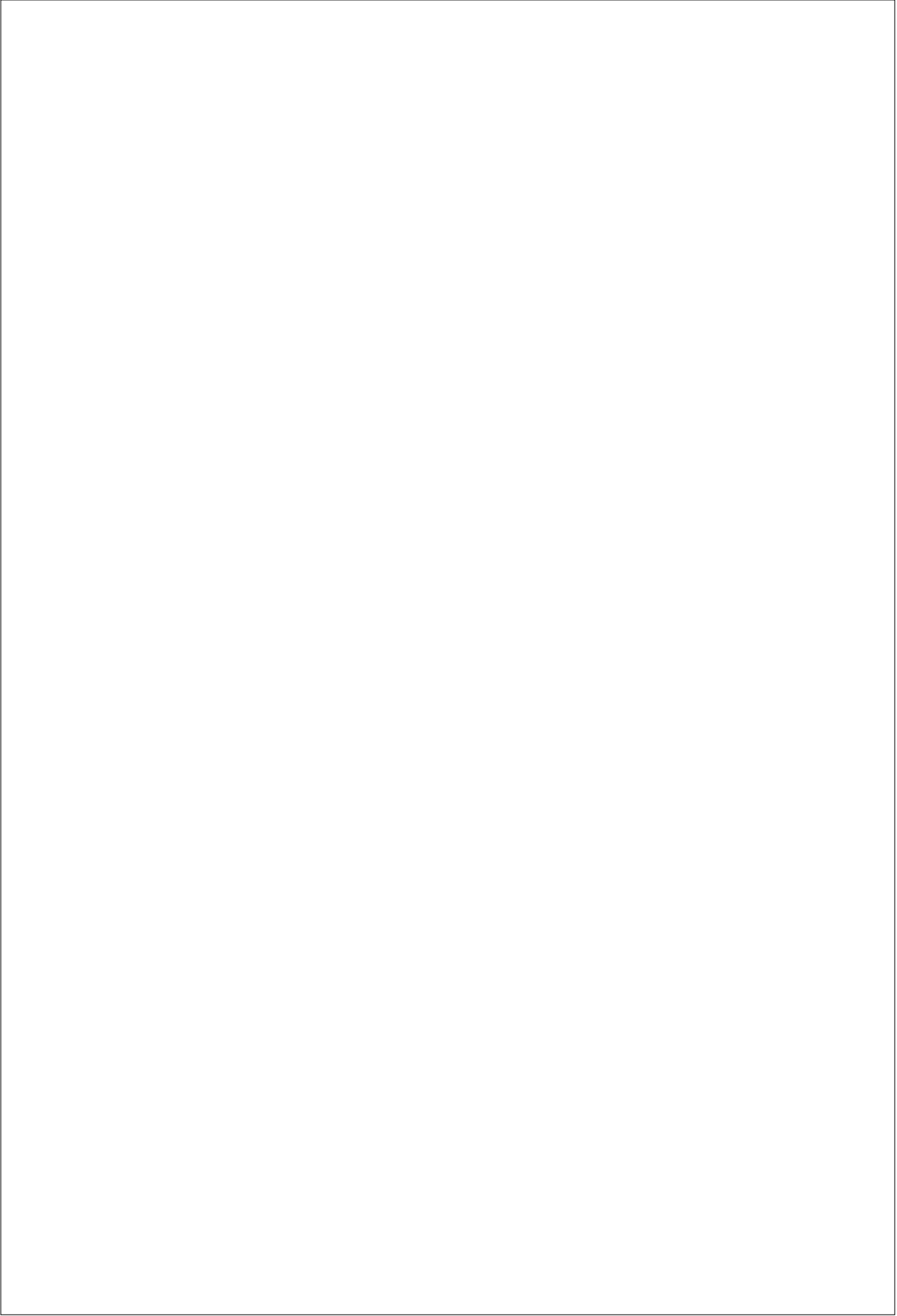
Jakarta, 12 Januari 2007
GUBERNUR BANK INDONESIA



Burhanuddin Abdullah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Cover Inggris



“Capitalizing on Stability for Sustained Growth”

**Speech by the Governor of Bank Indonesia, Dr. Burhanuddin Abdullah,
at the Annual Bankers’ Dinner 2007**

12th January 2007

Assalamu’alaikum wr.wb,

Good evening and greetings to you all,

I. Introduction

In commencing my speech, I would like to invite you all to join me in expressing thanks and praise to God Almighty who has again blessed us with the chance to meet in this pleasant and congenial setting at the Annual Bankers’ Dinner 2007.

On this wonderful opportunity and on behalf of the Board of Governors of Bank Indonesia, please allow me to wish you all a Happy New Year for 2007. May we all be blessed in every step that we take.

Tonight marks the fourth time I stand at this prominent forum, in the presence of you, distinguished ladies and gentlemen, to deliver the Governor of Bank Indonesia’s start-of-year briefing. This also suggests that it has been almost 4 (four) years since I was appointed to the position of Governor of Bank Indonesia. Despite some shortcomings as well as successes, I would like to thank you all for your support and cooperation that has been so forthcoming over the years.

II. Reflection of 2006 Economic Dynamics

A. Year 2006: The Year to Restore Stability

Distinguished guests,

The year 2006, which only passed a few days ago, was replete with splendid colours which I found most impressive. To policymakers in Government,

Parliament, and also Bank Indonesia, 2006 was a year which finally provided some breathing space, albeit with several footnotes. To entrepreneurs, 2006 was a year of mixed achievements. Enterprises in the real sector, in the manufacturing industry in particular, found 2006 a constrictive year. Competition pressures from more efficient and productive countries were enormous. Notwithstanding, 2006 was a year that generated much profit for participants in extractive industries, as reflected by the surging export level to countries that are our primary trading partners. Nonetheless, to the majority of the general public, 2006 was a truly trying year. It was a test of resilience and patience as a result of high inflation, which were direct and indirect effects of fuel price hikes in the previous year. With all these episodes, phenomena and dynamics, 2006 was a year we should nevertheless be thankful for.

For that reason, at the beginning of my speech tonight, I would like to invite you all, distinguished ladies and gentlemen, to compare notes and ask imperative questions regarding the intentions, motivation, steps and achievements for the year that has just passed us by. What have we achieved so far? What must we persevere within the coming year? What are our problems? Is it lack of hard work? Sincerity? Determination? Or is it something else? We are asking such questions while looking throughout the country and wondering where are we in the race to seek prosperity for all of our people? Could we be left behind by our neighbouring countries?

In the following section I will explicate the targets, hopes and dreams we must knit together this coming year, 2007. Inevitably, deep observation and sharp analysis are required on the numerous predicaments and on the social and cultural order of society, which will become the foundation of growth and development in our economy. Subsequently, towards the end of my speech I will present some messages, follow-up steps and policy measures that will take place this coming year, under one common goal, that is to make our economy a more prosperous one.

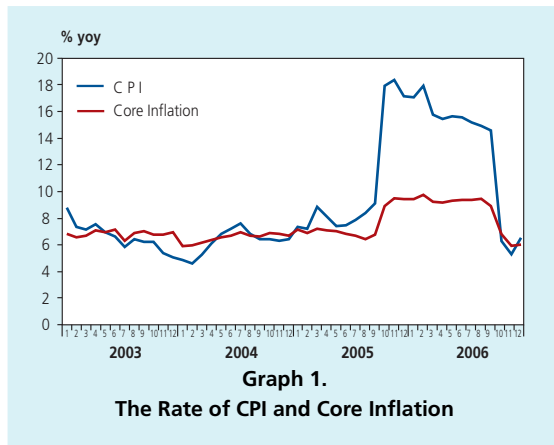
Distinguished guests,

The transition from 2005 is still fresh in our minds. We left 2005 full of hopes and concerns, because we were convinced that at the earlier part of 2006 we would still see some difficulties as a result of adverse external shocks, particularly the soaring global oil price. Nevertheless, hopes abounded during the early part

of 2006. We were optimistic, firstly, that macro economic stability would be restored to its proper path and be maintained so that economic enthusiasm would return to where it should be. Secondly, we also strived to achieve the first goals in order to quickly minimize the rigidities and structural inefficiencies in our economy.

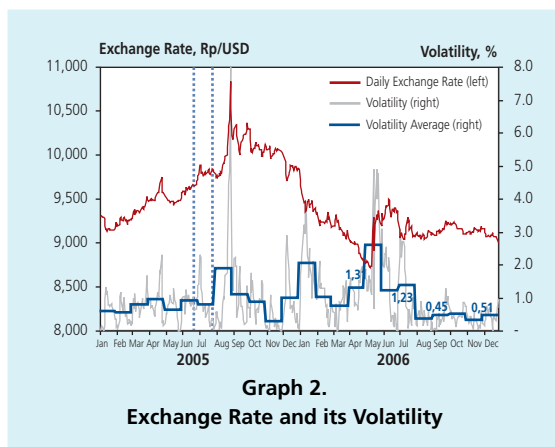
We should be grateful because we were able to maintain macroeconomic and financial system stability during 2006. Numerous indicators which endured pressures in 2005 have shown positive improvement in 2006. Relatively high inflationary pressures at the beginning of 2006 have gradually dissipated throughout 2006. By the end of 2006, the inflation rate was recorded at 6.6% (y-o-y); below the targeted rate of $8 \pm 1\%$ set by the Government and Bank Indonesia. Success in controlling inflation in 2006 also reveals that monetary policy was able to mitigate the second round effects of soaring global oil prices at the end of 2005 on inflation expectations (See Graph 1)¹.

Inflation stabilization in 2006 and relatively good performance in the balance of payments, with a surplus of 3,7% of GDP, also contributed towards a stable rupiah exchange rate throughout 2006, after significant depreciation in 2005. Entering 2006, exchange rate volatility had also decreased.



1 If we look a little further back, the *outlier* period, as a result of significant price changes in the economy, is generally beyond the control of monetary policy. On average, CPI inflation from 2003-2006 was recorded at 6% y-o-y outside its *outlier* in 2005, which was recorded at 17%.

2006 was also an important year as we settled our outstanding obligations to the IMF without triggering significant turbulence in the market. With the debt now cleared, we are now a 'regular' member of the IMF. Even though the outstanding obligations have been paid, our foreign exchange reserves position was maintained at an acceptable level. This improved the confidence of market players in the foreign exchange markets. Throughout 2006, the rupiah to US dollar exchange rate tended to be stable at a level of Rp.9,100 – 9,400 per USD with relatively lower volatility than the previous year (See Graph 2).

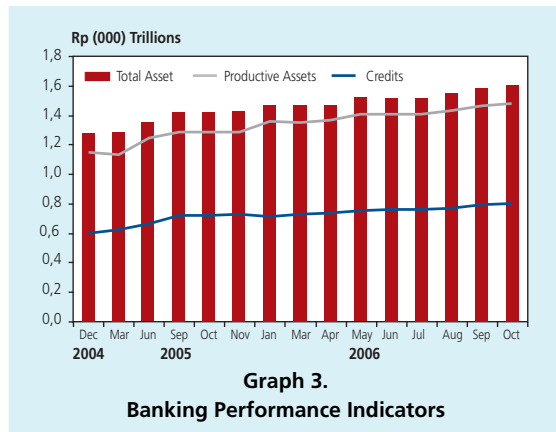


Towards the end of 2006, uncertainty regarding shocks in regional financial markets emerged as a result of the Bank of Thailand's policy aimed at stemming the flow of short-term capital into its financial system. Fortunately such fears never materialized. Although the rupiah fluctuated momentarily, it soon stabilised in line with its external balance. The policy taken by Thailand was based on its domestic considerations and economic interests. We also have our own considerations in formulating policies that match our own particular circumstances and interests. In this case, Bank Indonesia believes that the liberal capital account regime that has been implemented for many years remains congruent to our wider national interests. The economic theory of Kydland and Prescott regarding time inconsistency in employing a policy seems a relevant reference point with respect to the choice of policy regime which we have instituted *ex-ante*. We cannot simply alter our capital account regime to become more closed without precipitating a loss of credibility. Credibility, which we have strived painfully to achieve over the years, should not be thrown away merely due to the temptation of temporary benefits.

With the above positive developments, Bank Indonesia found the opportunity to gradually reduce the BI Rate during 2006. Throughout 2006, Bank Indonesia trimmed the BI Rate by 300 basis points, which by end of 2006 was recorded below 2 (two) digits, namely 9.75%. Such reductions were taken to preserve the positive market perceptions and support a more conducive business climate, while safeguarding stability in the financial markets amid capital inflows for portfolio placements.

The regained macroeconomic stability provided opportunity for a broad-based economic recovery. National economic expansion became visible in the second half of 2006, particularly in the growth of production indicators, although insufficiently balanced due to a less-than-conducive investment climate and the high-cost economy. Investment slowed compared to the previous year, and therefore made exports and private consumption the primary base of economic growth. Furthermore, beginning in the second half of 2006 we witnessed an upswing in credit growth, which was followed by acceleration in government spending, and thus helping to boost economic growth. At the end of 2006, economic growth was recorded at 5.5% y-o-y².

The national banking industry has achieved a gradual marked improvement over the last three years. Quantitatively, there has been a significant upswing across various financial performance indicators and banking industry activity. This was underpinned by growth in total assets, which was bolstered by a build-up in earning assets, including credit (See Graph 3). As of November, total assets in the



2 Bank Indonesia's estimation.

banking industry had risen to Rp.1,635 trillion, whereas credit portfolio rose by Rp.78,2 trillion (10.7%). This was funded by growth in deposits to the tune of Rp.123 trillion (10.9%). Banking capital was also maintained at a level deemed more than adequate, as reflected by the Capital Adequacy Ratio (CAR) which was maintained at the relatively high level of 20%.

Meanwhile, the level of Non-Performing Loans (NPL) in the industry has taken a significant dive, which indicates that, essentially, the prevailing condition of the banking industry has experienced a marked and continual improvement. It should be noted that the current level of NPL in the banking industry is heavily influenced by the NPL of state-owned banks, which still carry some long-standing problems from the past.

Qualitatively, the health and resilience of the banking industry over the last few years have also witnessed significant improvements. The human resources capacity within the banking industry has increased, along with the enhanced understanding of prudential concepts and risk management throughout the banks' organization hierarchies. The management information system, internal control system, risk-management system, good governance and all operational procedures that follow; have generally strengthened. The quality of the banking service is also a crucial factor for which progress is managed through the creation of a trusted customer protection system.

In the capital markets, the price of bank shares experienced a rather significant hike before finally stabilizing. Bank issued bonds also received a positive response from the market at an acceptable price. Deposits at banks steadily accrued year by year reaching 10% annually despite a continuous fall in the savings' interest rate, following cuts in the BI Rate. This could be considered as a strong indication that public confidence in the banking industry has recovered and even grown. Alterations to the Bank Deposit Guarantee Scheme, implemented in the latter part of last year, were performed smoothly and without triggering turbulence that could threaten overall financial system stability. Concerns regarding flight-to-safety and flight-to-quality from the customers of small banks, as a result of changes in the blanket guarantee scheme to a limited guarantee scheme instituted by the Deposit Insurance Corporation (*LPS*) have proved not to materialise, or at least minimised.

Meanwhile, the Rural Bank (BPR) industry has also shown growth. This industry plays an important role in developing Small and Micro Enterprises (Graph 4), and communities of villages and suburbs. There are currently 1,935

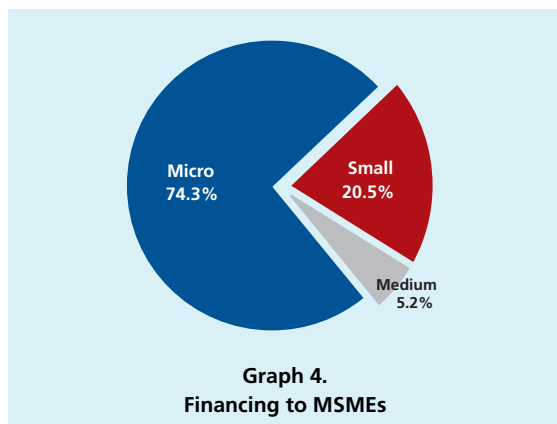


Table 1.
Performance of Rural Banks

Billion Rp

Description	Dec-03	Dec-04	Dec-05	Nov-06	Growth (Nov 06 - Dec 06)	
					Nominal	%
Total Asset	12,635	16,707	20,393	22,825	2,432	11.93
Total Third Party Fund	8,868	11,161	13,178	15,561	2,383	18.08
- Savings	2,617	3,301	3,757	4,448	691	18.39
- Deposits	6,251	7,860	9,421	11,113	1,692	17.96
Credit	8,985	12,149	14,654	17,041	2,387	16.29
Profit/Loss (on going year)	429	539	604	576	-28	-4.64
LDR	74.5%	80.7%	82.0%	82.2%	0.2%	
NPLs Gross	8.0%	7.6%	8.0%	9.9%	1.9%	
NPLs Net	5.5%	5.5%	5.8%	7.4%	1.6%	
CAR				19.5%		

Rural Banks with 3,157 bank offices with a credit portfolio reaching Rp.16,9 trillion (Table 1). As the nominal amount of credit is usually small, to reach a particular amount of credits extended, Rural Banks will have a much higher client ratio compared to that of Commercial Banks.

Ladies and Gentlemen,

Speaking about the development of the financial industry, and the banking industry to be more specific, four years ago, we clearly realized that banking industry supervision and regulation must be based on a long-term vision in its achievement strategy, and such a vision must be approached through systematic and measurable efforts.

Therefore, at the beginning of 2004, Bank Indonesia issued Indonesian Banking Architecture (*API*), a blueprint of upcoming banking industry guidelines, and the kind of vision, direction and form to be achieved. The holistic policies that Bank Indonesia issue to achieve such goals up until the end of 2010 are included as part of the *API* policy structure.

Since then, as our distinguished guests may observe, Bank Indonesia has continuously strived to manage and improve all aspects of banking activities. Each regulation, from strategic ones to the technical guidelines of operational courses of action, was designed to be a torch to light the darkness and lead the way. Steadily, albeit sometimes slowly, the national banking industry has achieved good progress and alleviated many of its problems. The pillars set forth in the Indonesian Banking Architecture have begun to transform into pillars of banking industry strengths, promoting greater stability.

Through the implementation of good corporate governance (GCG), the most recent Bank Indonesia survey suggested that nearly all banks have conducted self-assessments. The results of the self-assessments concluded that approximately 98% of banks in Indonesia have applied a minimum of 50% of the GCG principles, as mandated by PBI 8/4/PBI/2006 regarding GCG Implementation for Commercial Banks. Management information systems, internal control systems, risk management systems, and all operational procedures that follow, have generally progressed, however, there remains room for improvement.

As another step to greater ensure that good governance in the banking industry is upheld, in 2006 we took a step which we deem to be strategic. A step that we believe may help rebuild a good image and erase any negative perceptions that abound within the Indonesian financial system which can be exploited for illegal activities, such as money laundering. The step taken is the cooperation with various law enforcement authorities – The Indonesian Police, the Attorney General, The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) – and most recently the Corruption Eradication Commission (KPK).

The aforementioned cooperation between Bank Indonesia and the various law enforcement institutions is hoped to be able to clear any misperceptions regarding to coordination efforts in handling various banking crimes, including corruption. Perception, understanding, competence and the work ethic in dealing with multiple banking problems will be settled through a performance structure that is prompt, objective and proportionate. Therefore, it is expected that public

confidence, as the foundation of banking business, can be safeguarded and continually improved since it is guaranteed by a trustworthy law enforcement system.

As a result of our relentless endeavours, the dark cloud that has overshadowed the national banking industry for so long has begun to disperse little by little. We should also reinforce our pledge and commitment, as well as find the faith that we will, in time, accomplish our ultimate goal: “the establishment of a sound, strong, beneficial and rewarding national banking industry”.

B. Several Problems in 2006

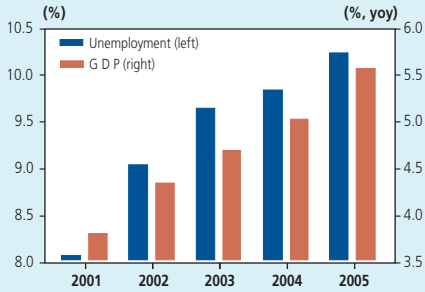
Ladies and Gentlemen,

Based on my previous comments, it would not be excessive to say that there have been numerous successes achieved during 2006. We have successfully enticed our economic machines back on the proper track. We have reduced the cost of financing, which was the direct result of high inflation. We have reiterated that the economic management of our country will only succeed if it is us, ladies and gentlemen, who do it. However, against this backdrop, we also comprehend how serious our perennial carry-over problems have become, which we have shouldered year after year. That is the structural rigidities within our economy, which in turn has paved the way for inefficiency, squandering time and resources in the form of excess liquidity and unemployment, and abject poverty that continues to worsen.

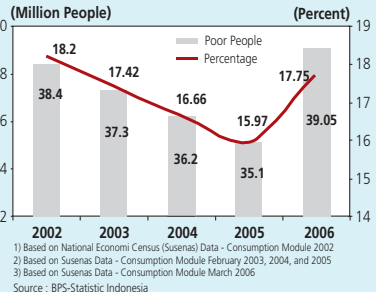
Meanwhile, the condition of the real sector, which forms the spine of the country, is faced with an inevitable paradoxical phenomenon. The growth and expansion of economic capacity that took place over the last few years tended to favour capital intensive sectors rather than labour intensive ones. Unemployment continues to grow despite a prospective economy. Lately, we have also observed the exacerbation of poverty. Graphs 5 and 6 provide an illustration of the paradox of growth phenomenon.

There is a suggestion that such paradox of growth occurs due to structural imbalances in the Indonesian economy. Distortions caused by imperfect market structure and the presence of oligopolystic industries, which were legacies of Indonesia's economy history, have caused the economy to work only sub-optimally and restrain the market's ability to allocate resources efficiently. Such distortions

(The Paradox of Growth)



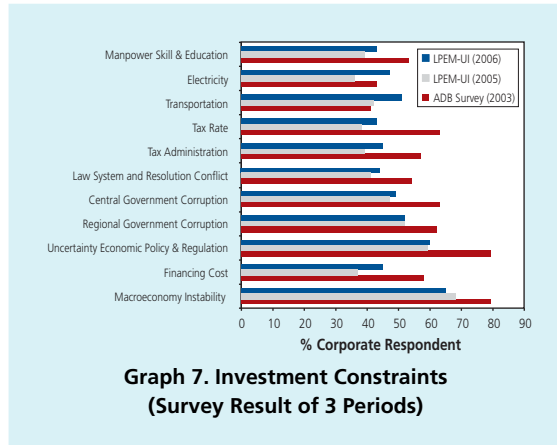
Graph 5.
Growth of GDP and Unemployment



Graph 6.
Numbers and Percentage of the Poor

limit access and broader participation in economic activities. This situation has been present for too long and thus making it easy for us to forget to address it. We must now immediately open the doors of access and invite broader participation in the economy through improvements in investment climate, licence process simplifications, and other improvements. I believe that we all understand that it is only through these means we can achieve high quality growth, which in turn will resolve the large income gap issue.

From this argument, it is clear that improving investment climate, opening easier access and broader participation in the economy are important factors in post-crisis economic recovery. Meanwhile, it has been found by non-governmental institutions such as LPEM UI and ADB that there remain many constraints to investment. The development of these constraints in the recent year hints us that the investment climate has yet to improve on a general level. Moreover, referring to the most recent survey results, illustrated on Graph 7, some of the constraints have followed an increasing trend, such as uncertainty surrounding economic policies and regulations; corruption; taxation related matters; the skills and education of human resources; infrastructure, particularly electricity and public transport; a poor legal system and protracted conflict resolution; as well as cost of financing. In connection to these survey results, we can also observe that the revision of Taxation Law; Labour Law; Customs Law; Investment Law; infrastructure improvement and future energy security; legal certainty; and the harmonisation of regulations between central and regional governments, were regarded by both domestic as well as international investors as constraints to investment activities in 2006.

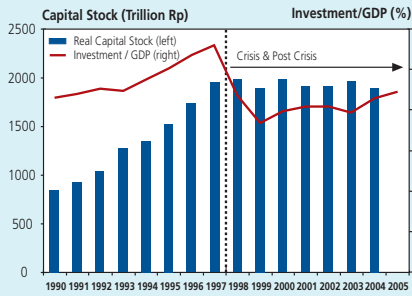


As a result of the above, investors and the banking industry; be they domestic or international, perceive the presence of high micro-structural risks in our real sectors. This is why only minimal interest abounds in long-term investments, as shown by the low growth of Foreign Direct Investment (FDI) to Indonesia in the post-crisis era, despite the very high FDI potential of other countries in the Asian region at the moment.

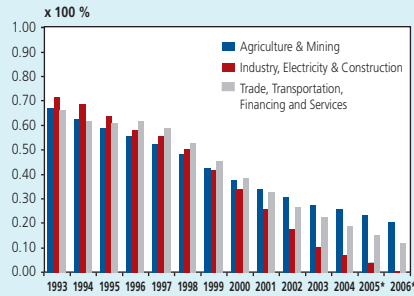
Table 2. Indonesian Position Relative to its Peer Group Survey Results of IMD (*World Competitiveness Report*)

Country	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	26	28	29	24	31	19
India	42	41	50	34	39	29
Indonesia	46	47	57	58	59	60
Korea	29	29	37	35	29	38
Malaysia	28	24	21	16	28	23
Philippines	39	40	49	52	49	49
Singapore	3	8	4	2	3	3
Taiwan	16	20	17	12	11	18
# Countries	49	49	59	60	60	61

Compared to other countries in the Asian region, the micro risk and distortions prevalent in the real sector have contributed to lower efficiency and productivity in the Indonesian economy. IMD survey results published in the World Competitiveness Report 2006 show that, based on economic performance, government efficiency, business environment efficiency and the infrastructure in Indonesia, our country is positioned at 60th out of 61 countries (See Table 2).



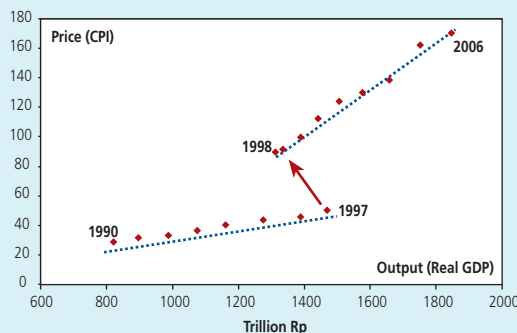
Graph 8a. Accumulation of Capital and Investment Share in GDP



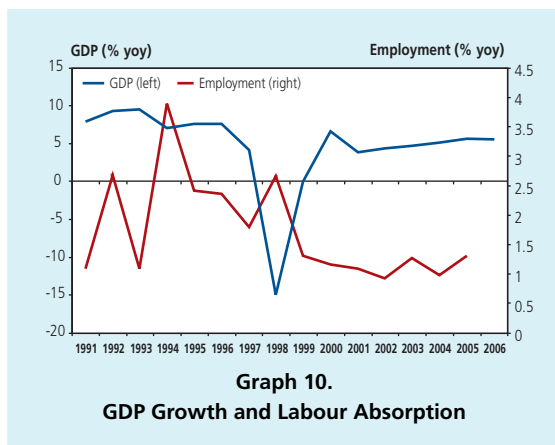
Graph 8b. Age of Productive Capital

Meanwhile, a World Bank survey on investment supporting factors shows that Indonesia has dropped to 135th place in 2006; from 131st in the previous year.

The tribulations I have just mentioned, compounded by the passage of time, have caused a slower accumulation of capital, reflected by a stagnant investment growth, and a contraction in the share of investment in GDP (See Graph 8a), as well as a significant reduction in the quality of capital in the economy (See Graph 8b). The downside of such low accumulation and quality of capital is reflected by the phenomenon of supply side rigidity in the post-crisis economy. Such a case is illustrated in Graph 9, which shows a steeper slope in the dynamics of price and output in Indonesia in the post-crisis era. The supply side rigidity in



Graph 9. Comparison of Price and Output Dynamics between 1990 & 2006 as a Reflection of Supply-Side Rigidity in the Post-Crisis Era



the post-crisis economy has in turn triggered the low absorption of labour and reduced the speed of economic growth (See Graph 10). These last two aspects clearly pave the way to wide-reaching social and economic effects: Our poverty level has risen along with widening socio-economic inequalities (See Table 3).

Table 3. Gini Ratio

Region/Group of Residents	2002	2003	2004	2005	2006*
40% Lowest	20.92	20.57	20.80	20.25	19.20
40% Middle	36.89	37.10	37.13	35.05	35.08
20% Highest	42.19	42.33	42.07	44.70	45.72
Gini Ratio	0.290	0.320	0.320	0.340	0.345

Source : BPS-Statistic Indonesia

* Projection

From a different perspective, micro risk and economic distortions, which curb investment, are also reflected by the decoupling of the financial and real sectors. Banks become reluctant to distribute funds to the real sector and tend to place their funds in low risk financial instruments, such as *SBI* and *SUN*. Bank funding to the real sector significantly drops and we are then left facing a liquidity overhang in the form of outstanding *SBI*, which currently amounts to slightly above Rp.200 trillion, forcing an imbalanced economic growth. Our economy only grows with one engine. **We are flying with only one engine!** The real sector tends to move slowly since micro-structural risk impedes on banking intermediation,

whereas the financial sector continues to expand due to the constancy of funds invested into it. Such conditions are very unhealthy to our economic system as a whole if they persist.

In addition, micro risk and the structural distortions in the economy, which trigger supply side rigidity, have caused the economy to be more vulnerable to external shocks and inflationary pressures. Our core inflation rate has remained persistent. This constraint has surely affected the funding interest rate in the economy as a whole, which tends to be relatively high. This series of events have caused collective suffering for all. By looking deeper to see who will suffer the most from such situation, we can all agree that it is not morally justified. My whole argument is to reaffirm that corrections to structural distortions and improvements in investment climate are the primary determining factors of the interest rate's ability to slide naturally, whilst maintaining stability. It is through these means that a sustainable development may be realized.

Distinguished guests,

Prevailing conditions combined with our turbulent economy, noted or not, will continue to aggravate other problems in social, political and cultural life. I have noted some of the disarray in public social life that tends to prioritize the interests of a limited group compared to broader national interests. Consensus and commitment, which we have all agreed upon, are barely felt. Many of us move towards self-interest fulfilment and it is, therefore, very difficult to connect with one another to achieve our national interests. More than ever we require a common thread that can unite us as a unified country. In terms of global relations, upon seeing other countries marching forward, concern, powerlessness and a sense of alienation abound. We praise and study their successes, nevertheless we remain unable to match their lead.

Meanwhile, violent culture, self-centred social conduct, regressive ideas, extremism, intolerance and a terrible work ethic are becoming the bread and butter of this nation. Political developments in the post-crisis era have only provided a minimal level of valid rewards that could possibly affect public prosperity. Democracy, which we have adopted as the cornerstone of development, remains primarily out of reach and unable to optimise the greater interest of our nation.

These inauspicious events, which I have briefly outlined today, unfortunately have been made even worse, marked by a series of natural disasters

that ripped at the heart of our beloved country. Another disaster seems to strike and rub salt in our wounds while we are still mourning and trying to recover from the one before. Earthquakes, tsunamis, long droughts, bush fires, a mud volcano, and the most recent floods and landslides, all struck in succession at different regions of the nation. The economy of the victims in the disaster areas is extremely constricted despite all the aid that has poured in. We at Bank Indonesia have asked the banking industry to provide special allowance for credits to business enterprises throughout the nation that are affected by the disaster. We hope that this will further assist them with the establishment and reconstruction of their business ventures. Regrettably, this step remains far from adequate.

Against this abhorrent backdrop, the public urgently requires a united front from all of the nation's components to share concern and hope. We all feel troubled by the crises we are facing. We need a political and cultural strategy to restore the nation's consensus and commitment, awaken the sense of importance, eliminate the feeling of being alienated, and become more receptive towards hope. For this reason, we, distinguished ladies and gentlemen, should be able to demonstrate to the public that we are performing to our fullest capacity, be it as the regulatory authority, banking, the business world, mass media, or any other key role, all in the interest of the affected masses. We must unite, help one another, and work much harder to overcome our economic pitfalls. Only by doing so will the very real hope of improvements in all aspects of our nation's life be established.

Regarding to economic issues we face, I am sure that we can all agree that coordination and cooperation with various other institutions which have the authority, expertise, and appropriate policy instruments will be instrumental in resolving those issues. It is clear that monetary and banking policies cannot resolve various structural problems related with unfavourable investment climate and distortions in the goods and services market which in turn cause high costs in the economy. Bank Indonesia, as the monetary and banking authority, has limitations in its tasks and its policy instrument's scope of reach.

In accordance with the mandate given by the Law, Bank Indonesia can only contribute to the nation through its efforts in maintaining macroeconomic and financial system stability. Still, the achievement of such a mandate will largely depend on coordination with other authorities, cooperation with various parties, and the help and support of various stakeholders. We do realize that there remain many weaknesses in the area of banking supervision, even though today's banking industry is much sounder, stronger and more profitable compared to several years ago.

IV. Economic Outlook for 2007

A. 2007: A Defining Moment

Ladies and Gentlemen,

With respect to the overall condition and dynamics of the economy in 2006, it would not be excessive to say that 2007 is **a defining moment**: the year when capitalizing on macroeconomic stability to generate greater optimism for the lasting recovery of our nation's economy becomes essential.

In this defining moment, the journey of development for our country is entering a critical phase. Everything that we achieved back in 2006 has led us towards the middle of a bridge of hope, which we should immediately cross by expending our every effort and wholeheartedness but while exercising caution at all times. If we are able to keep pacing forward and safely across that bridge, then the hope of a better future will open wide before us. However, if we are forced to halt because of our uncertainty or loss of direction, then the proverbial bridge will crumble beneath us due to the excessive burden that we carry. We would drop back to square one and would, in fact, then face an even higher mountain to climb.

Entering 2007 means that we are entering the 10th (tenth) year since we were hit by the multi-dimensional crisis that so devastated all aspects of our nation's life. 10 (ten) years is a lengthy period of time for a nation to recover. **We need to tell ourselves that enough is enough!** Delay will only continue to marginalise and alienate our great nation in the ever increasing pace of globalization era; filled with stiffer competition between countries. Delay will crush us in time. There's only one way for us to resolve our problems. If you want to have a prosperous life, work hard! There's no substitute for a hard work. Hard work towards self-improvement is a sufficient condition on the road to better future. Therefore, 2007 is the perfect time for us to work harder with better focus and greater commitment. **It is now time to act because inaction can be fatal!**

In the midst of World War II, under extreme pressure, Sir Winston Churchill once said "**We shall prevail**". This phrase is relevant to our condition at the moment. There will not be any chance of losing sight of the prize if we grab tightly with both hands our spirit, faith and hope. The crisis ten years ago may have almost severed most of our life lines, but it could not extinguish our hopes for the future of our nation. Never have we surrendered to any predicament in the history of our nation. We have always risen from the depths to fight for our dignity and pride as a sovereign nation.

From Bank Indonesia's perspective, the macroeconomic condition in 2007 is expected to remain stable and will become the primary foundation to achieve higher growth, provided that micro risk factors and distortions in the real sector can be minimized and the investment climate improves significantly.

Economic growth in 2007 is projected to reach 6.0% (within a range of 5.7% - 6.3%), which surpasses economic growth in 2005 and 2006. In the first semester of 2007, the main thrust of economic growth will stem from consumption with some assistance from private investment. Such a rise in consumption will be fostered by an upswing in public purchasing power as a result of the plan to raise the salary of civil servants and the regional minimum wage early in the first semester of 2007 and to maintain inflation at a low targeted rate. Economic growth is projected to be even more robust in the second semester of 2007 along with significant improvements in private investment and greater government capital expenditure. The expected increase in private investment will be encouraged by greater confidence among economic agents regarding improved economic prospects, but also by the positive effects brought about by a slide in both the inflation and interest rates, on top of a stable exchange rate.

Externally, exports are projected to grow steadily but remain stunted due to global economic growth, which is not as buoyant as during 2006. On the other hand, imports of goods and services are projected to rise along with a surge in domestic demand. Judging by the most recent export growth figures, which are primarily attributable to natural resource commodities, the falling trend in the prices of global commodities is projected to be offset by export of manufactured goods, as investment climate improves. A number of commodities are expected to provide the largest contribution; including textiles, electrical appliances, chemical products and machinery.

Table 4.
The Outlook of Indonesia's Balance of Payments

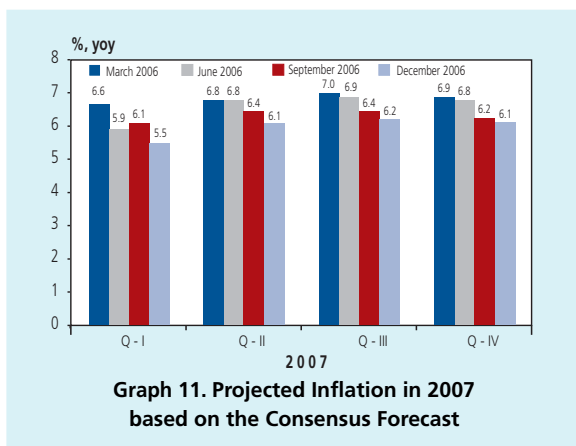
	2005	2006*	2007**
I. CURRENT ACCOUNT	0.11	2.73	1.87
II. CAPITAL & FINANCIAL ACCOUNT	0.10	-0.24	-0.41
III. OVERALL BALANCE	0.16	3.67	1.46
Memorandum Item:			
Reserve Assets Position (US\$ Million)	34,724	40,422	46,466
(In Months of Imports & Official Debt Repayment)	4.4	4.3	5.0
DSR (%)	17.3	24.6	19.3

Notes: * Preliminary, ** Projection

The balance of payments in 2007 is expected to record a surplus, although not as large as the surplus in 2006 (See Table 4). The smaller surplus is attributable to an increase in import demand along with a boost in economic activities. According to our projection, the current account balance for 2007 will reach a surplus of 1,87% of GDP. As per the projected balance of payments, foreign exchange reserves in 2007 are expected to be around US\$47 billion. The surplus in the balance of payments, the increase in foreign exchange reserves and market confidence in the quality of macroeconomic policy management will, in turn, support the stability of the rupiah exchange rate in 2007, which is projected to move in line with the external balance.

Greater economic activity in 2007 is not expected to add excessive pressure on prices, in general, so that CPI inflation is expected to remain within the target range set forth by the government, namely 6% ± 1%. The growth in demand is expected to be offset by improvements in supply as investment climate improves and, as such, is not anticipated to heap more pressure onto core inflation. Projected CPI inflation in 2007 is also supported by the preserved inflation expectations of market players (See consensus forecast in Graph 11) and low upward pressure on administered prices along with the scrapped government plan to hike the prices of strategic administered groups of goods. In addition, inflationary pressure on the volatile foods group is estimated to be low thanks to government commitment to ensure the smooth supply of food, particularly basic necessities.

Nevertheless, I must underline some factors that may affect the economy in 2007. Economic growth in 2007 has the potential to surpass expectations



provided that some crucial facets of the government's agenda for 2007 are implemented immediately; such as improving the investment climate; reducing economic distortions; bolstering infrastructure development, particularly energy, public transport; and, modernization of industrial machineries. Against this backdrop, Bank Indonesia predicts that economic growth may reach 6.3% with private investment as the primary driver as well as consumption

Conversely, the opposite may also be true in the form of sluggish economic growth; reaching just 5.7%, if various constraints and downside risks are unable to be mitigated. The constraints are related to production capacity flexibility in balancing the mounting demand, primarily stemming from an unchanged and unfavourable investment climate and the high-cost economy. Furthermore, economic projections for 2007 will also be influenced by the ability of the domestic economy to absorb the risks that may emerge in 2007, in particular those related to global financial flows.

Whichever scenario that would actually take place in the process, the ever increasing support role of banks to provide funding will also be a critical factor if the projections are to be realised. In 2007, credit growth is expected to reach 15%-18% with a focus on infrastructure and labor intensive - low import content sectors, such as the agricultural sector and its respective sub-sectors.

To this end, the hitherto constricted capacity and capability of particular banks to distribute funds, due to the prevailing high NPL value, should be resolved post-haste. Presently, we can witness how an array of accelerated infrastructure projects desperately require bank funding, particularly state-owned banks. If this is undertaken with proper sequencing and at a measurable pace so as not to induce macroeconomic instability, the success of these projects is predicted to generate significant multiplier effects on the dynamics of other sectors.

If the projections I have mentioned come to fruition, it is expected that the liquidity overhang and value of un-disbursed loans, which are currently rather large in the banking industry, will fall in 2007. Moreover, funding from outside the banking sector, which recently saw a rise, is expected to continue to bolster the recovery of a broad-based economy. In relation to this, the banking industry is faced with the threat of even tighter competition, be it between the actors within the banking industry or even from actors outside of the banking industry in funding provision. This requires players in the industry to look more introspectively, to judge if they can weather the storm of such stiff competition. Each actor is obliged to improve their operational efficiency, which is currently deemed as insufficient,

particularly for domestic banks. Thus, a constrictive interest rate environment would immediately be followed by a fall in the banking credit interest rate, which has been suggested is rigid throughout the adjustment process. Over time, this would, in turn, boost the competitiveness of the banking industry, and the actors could enjoy a lower interest rate.

B. Direction of Economic Policy in 2007

With respect to the projections that I have been discussing, I would like to reiterate that distortions and the unfavourable investment climate are the primary constraints faced that could retard a balanced economic recovery in 2007. From Bank Indonesia's perspective, all of the limitations I have mentioned could hamper the array of measures taken by Bank Indonesia to achieve and preserve macroeconomic stability. The economy will become more vulnerable and less able to mitigate the range of domestic and external shocks. Our monetary policy stance would tend to be particularly cautious, especially when unexpected shocks occur that may trigger risk to price stability.

In terms of the wider national interest, it will not be possible to permanently and continuously alleviate poverty and reduce unemployment without structural improvements that slash the high-cost economy and enhance the investment climate.

I therefore see the benefits of the following policy strategy :

1. From the monetary policy side: the implementation of inflation targeting framework (ITF), within the wider structure of macroeconomic policy, is a strategic step that must continually be taken by Bank Indonesia to maintain market confidence on macroeconomic stability and overall financial system stability. A number of issues related to capital flows, exchange rates and the interest rate within a liberal capital account regime and a floating exchange rate environment should be placed in the context of global economic adjustments and the kind of macro-monetary policy response that would be appropriate to deal with them. In this context, policies that provide incentives for long-term capital flows should be prioritized over policies that punish short-term capital flows. In addition, to support the financial market development and to improve monetary policy effectiveness, we also see the need to improve the operational structure of monetary policy.

2. In terms of financial sector policy: Bank Indonesia acknowledges the importance of bolstering the financial market development to mitigate economic shocks. To this end, and by observing numerous potential shocks in the global and domestic markets over the next 1-3 years, some policies to expand and deepen the domestic financial sector need to be instituted without delay in 2007. This requires a coordinated and collaborative effort involving Bank Indonesia, government institutions and banking institutions –as the primary component of the financial sector– as well as non-bank financial institutions.
3. From the banking policy side: Bank Indonesia sees the need to promote indirect banking intermediation through diverse efforts to foster universal banking without jeopardizing the ongoing banking sector consolidation. We must also direct such endeavours to encourage financial market deepening.
4. From the government's side: the implementation of sharper government policies to reduce micro risk in the real sector through thorough improvement of the investment climate is critical in 2007, including to expedite infrastructure development and the provision of a sustainable energy supply. It is also necessary to eliminate the range of distortions in the goods and services markets expeditiously so that the high-cost economy may be suppressed immediately. Moreover, 2007 would be a great year to develop sectoral focus in the strategy and implementation of long-term national development, with more weight given to labour-intensive sectors with high local input.

On that last note over the economic outlook for 2007, allow me next to elaborate some of my thoughts on the essence of the problems and challenges that national banking needs to address this coming year.

V. The Essence of the Problems and Challenges facing Banking in 2007

Distinguished guests,

Before profoundly focusing on the forward direction of banking industry policy, please allow me to centre our view on a broader illustration of the problem. This evening, I will not venture too deep in emphasizing the micro technical problems confronting the banking industry; something I have normally done in my speeches over the last three years. On this blessed occasion, I will try to guide your thoughts and views to participate in figuring out how the role and purpose of the banking industry are supposed to be placed in achieving the goal of national economic development.

In my understanding, our ultimate target of economic development that we strive to achieve is the establishment of “Perpetually Higher and Better Economic Development”. Only with higher economic growth with a better quality of economic development can we, **together**, alleviate poverty and overcome unemployment problems.

To achieve our target will require cooperation and hard work from various parties, including the national banking industry. The role of banking has become incredibly strategic in accelerating our national economy. This is the reason why we need a healthy and robust banking system which significantly contributes to funding the economy. Such banking system will strengthen the capacity of the financial system in particular, and the economy in general in confronting multiple shocks amidst a national economy that is becoming increasingly internationalized and integrated with the global economy.

The aim of strengthening banking institutions on the one side, and optimising the banking intermediation function on the other are not two separable or debatable things; they are not dichotomous. They both resemble two sides that make up one coin as a whole. Only through strong banking, which is able to execute its intermediary role properly, can we achieve financial system stability and ensure the usefulness of banking to the general public. Throughout the past three years, Bank Indonesia has undertaken numerous measures to fortify our regulation as well as supervision of; to persist with the restructuring of individual banks; to establish sound banking industry infrastructure

Throughout 2004-2006, we have personally experienced activities which should have been concluded expeditiously but ended up protracted. Conversely, there have been activities that we thought would take a long time which were concluded swiftly. This is why we make adjustments to our policy. However, in the process of determining policy, the overarching goal, which is to build a solid and beneficial banking system, is something that we must consistently strive to achieve. In the process, policy instruments may require adjustment depending on the prevalent situation.

This restructuring process to me is a continuous and dialectic social process, which we can all dynamically comprehend and participate in. We have overcome numerous troubles and challenges, but there are even more that we must address, since it is true that “**Life is a game of improvement, not a game of perfection**”. Therefore, it is quite ordinary if adjustments occur in a policy, especially when the conditions and dynamics of our environment demand so. There is, however, a

contemplation that we rely on as the monetary and banking authority: we will only consider adjustments to micro policy on condition that adjustments are taken measurably and cautiously, without sacrificing macroeconomic stability as a whole and consistent in the context of the overarching goal.

In entering this defining moment, it also critical to note that in order to achieve such continuous economic growth, we require the presence of a robust formal sector which able to perform optimally. Emphasis on the informal and micro, small and medium enterprise sectors, albeit with significant growth, should be considered as a temporary supporting pillar. It is true that we must push these two sectors to become a formal sector that is thriving, large, reliable and not merely serving as a social pillar. We must also encourage the expansion of the formal industry sector so that it can absorb more of the available unemployed human resources. Regrettably, since the dynamic and developing crisis, this sector has remained insufficiently significant to achieve the desired growth. Investment in this sector is limited compared to the amount required for noteworthy growth.

Perhaps we should remain patient and wait for investment to come to this country. After all, we all aware that the government has strong commitment and is working hard to overcome the numerous obstacles in the investment climate. However, while waiting for the investors to arrive, there is one thing that worries many parties: the snail-like pace of the banking intermediation function. Anxiety stabs at our hearts and pierces our thoughts. Why would the banking industry hesitate to utilize the available potential: while banking industry restructuring has shown its success; while infrastructure has been equipped by the presence of the Deposit Insurance Corporation and the Credit Bureau; while banking institutions have been bolstered; and amidst improving macroeconomic conditions? The pattern of banking operations still contradicts funding the consumption sector and the allocation of funds in financial markets. The latter issue reflects an unproductive, and thus unsustainable, operational pattern. Such limited operations are also, in essence, skewed away from our commonly agreed banking industry goal, namely to ensure an effective, efficient and significant banking industry for the good of the Indonesian economy.

This issue requires serious attention and immediate resolution. The banking industry would like to avoid being deemed as indifferent, insensitive and not serious in comprehending the national complexity. Apart from the existence of unresolved problems in the real sector, this condition should not be used as an excuse for banks to stagnate and cease trying to stimulate activity in the sector.

Moreover, the banking industry is the most anticipated catalyst to create a breakthrough, to lure investments that will kindle corporate industry activity and take over the role of consumption that has been the spine of economic growth for the last 5 years. These hopes are not excessive considering all the efforts expended to provide us with the confidence in banks' capabilities as the primary engine driving the rise of the Indonesian economy.

The banking industry must take the reins immediately through its role in intermediation. Banking has to be able to redirect its operations from financing consumption credits and placements in financial sectors which has been representing its principal weapon for more than the past 9 years; towards a more productive way of funding working capital and investment credits. We even believe that if banks are able to raise their productive funding to Rp.150 trillion in 2007, especially towards ventures with low imports and which are highly labour intensive, then the economy will be able to expand above and beyond current projections.

To this end, banking is required to be able and willing to open up and look for new opportunities in terms of funding. Current economic demand dictates that extra effort from the banking industry is required to communicate and to better recognize the characteristics of the surrounding business world. With better recognition, I believe that the perception of banks to a high level of risk exposure in the domestic business environment can drastically be reduced. There are abundant industries out there that are waiting for assistance from banking. To name a few, there are the aquaculture industry, agriculture, plantations, mining and other industries that have always perceived banking to not be on their side. In addition, I also demand that the banking industry seek innovations in its funding products. The problem with infrastructure funding is that requires a great amount of finance, albeit vital in stimulating economic activity. I am confident, however, that it can be dealt with through the innovation of funding products by the banks themselves. A credit consortium and syndicate represent another choice for bank in reduce their risk exposure that has to be born in funding projects of relatively high value.

Therefore, in 2007 I expect bankers to work harder, be more innovative and more creative in packaging credit as well as bear credit risk exposure together. Bank Indonesia will assist all of you, with policy support, through the steps necessary, which I will elaborate on in my briefing this evening.

VI. Direction of Banking Policy in 2007

Ladies and Gentleman,

With the desire and spirit to rise above the existing problems, allow me this evening to deliver my thoughts and views concerning measures that can be undertaken by Bank Indonesia to support national economic growth. My views comprise of 8 (eight) leading principles of policy direction and strategy, which will be enacted in the coming years.

Firstly, Bank Indonesia will more actively function as a catalyst in the process of increasing bank intermediation function towards the real sector. In facilitating bank disbursements in the financing process, Bank Indonesia will seek and dominate information as well as thoroughly observe the dynamics of the real sector, as an inseparable part of studying macroeconomic indicators. Various movements and dynamics in this sector will be analyzed, studied and monitored routinely by Bank Indonesia, since this sector can influence macro indicators.

For me, Bank Indonesia's understanding of real sector conditions, which has always been sought through research, studies and surveys as well as direct participation to observe actual conditions, need to be utilized by other parties, particularly banking institutions. BI will promote itself as the National Economic Database as well as the Information Centre of Economic Studies that is available to all parties. Against this backdrop and in addition to propagating the fruits of its labour, BI will service the requirements of its stakeholders by conducting researches and studies on various business sectors and industries, including micro, small and medium enterprises (MSME), both independently and in collaboration with the banking industry. Initiatives to establish the research subject in the various business sectors is offered to parties in need rather than by BI itself; as has been tradition. Within this framework, it would be acceptable for me to say that the banking industry is the industry most likely to fully utilize Bank Indonesia's endeavours.

In the recent decentralization era, Bank Indonesia feels the need to take a critical role in encouraging provincial business movement. Having 37 offices in provincial capital cities and other major cities in Indonesia, physical proximity between Bank Indonesia and people throughout Indonesia will be narrowed through the improvement of its role and function, as well as supporting regional economic research in order to satisfy public needs wherever we are.

For that reason, we have formulated an initiative to adjust the overall BI organization, including the initiative to revitalize the function and role of Bank

Indonesia branch offices (KBI), and the possibility of opening new offices in areas whose development requires KBI support. The ability of KBI to participate as the extension of Bank Indonesia in communicating the results of research and studies on the business environment will be greatly improved. Apart from taking part in this generic role, the potential of KBI will also be sharpened in order to comprehend specific issues faced in its locale; being more active in providing advices to regional government and economic actors/agents; resolving existing issues; and providing a useful source of information to participants of the regional economy.

Through the realisation of this measure, Bank Indonesia is constantly ready to serve and utilize its significant resources. Skills, competency, data, information as well as the infrastructure held by Bank Indonesia is, in essence, nationally owned and has to be accessible for development purposes. We are also ready to place researchers from Bank Indonesia on various research projects or helping with the preparation of development policy throughout the nation. With these numerous collaborations efforts, it is hoped that the outcomes of Bank Indonesia work will be seen to support national issue resolution and directly deliver the needs of its stakeholders.

We realize that the decentralization phenomenon present amidst the pace of globalization and economic democratization requires advanced economic management. Currently, without questioning their readiness, regions have been directly faced with global competition. For instance, the tourism industry in Bali directly competes with Phuket in Thailand. The dried fruits industry in East Java has to jockey with the same industry in Cebu Philippines. Without adequate knowledge regarding the state of the competition and various upcoming challenges, as well as guidance in confronting those obstacles, it is possible that regional industries will experience uncertainty or even make unfeasible moves that can weaken their competitiveness in international trade. To this end, Bank Indonesia will participate and conduct real sector studies from the perspective of regional uniqueness and niches.

The **second** strategy and direction of policy which will be taken in the coming year is to collaborate and coordinate with the government in order to reorganize the national banking industry through the revitalization of existing banks and their role, especially state-owned banks.

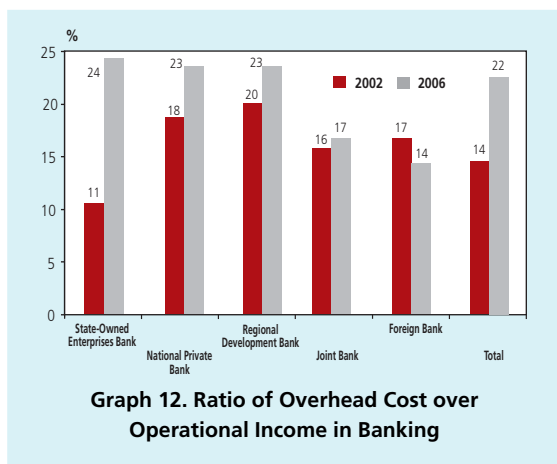
We fully support and openly welcome the policy steps taken by government to improve the performance of state-owned banks. In our view, the rejuvenation of state-owned banks is a step that needs to be taken immediately,

especially due to their strategic role and position in the national banking industry. At present, the total assets of state-owned banks amount to 37% of the total assets of the banking industry with share of credits at almost the same level of around 36%. We have a high expectation that state-owned banks are capable of taking the lead in endorsing the bank intermediary function, which is currently sub-optimal. Furthermore, we also rely on their power and competence to fund various development projects that are in the interest of many people.

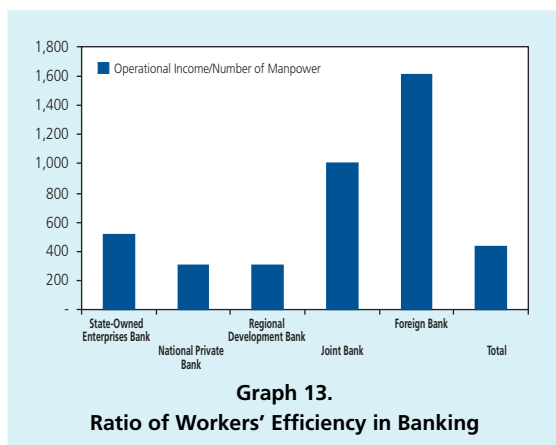
However from recent progress, we have notice that competition within the banking industry for potential customers with good track records is becoming very heated; it is neck and neck. What is noteworthy is the participation of foreign-owned banks, including joint-venture banks, adding to the competition with their readiness and strength of service.

Competition challenges from foreign-owned banks will gradually become an important factor that must be noted by domestic banks, particularly state-owned banks within the same peer group. Looking at the data, it appears that the credit allocated by foreign-owned banks is showing improvement.

One of the key strengths of foreign-owned banks in penetrating the markets is their higher efficiency level compared to state-owned banks. The efficiency of foreign-owned banks is clearly reflected by their low ratio of overhead costs to operational costs, such that they are capable of offering credit at a lower interest rate without sacrificing profit (See Graph 12 and 13). This efficiency is also supported by excellent credibility and image, so that foreign-owned banks



are able to incur relatively lower costs of funds. On the other hand, the efficiency level of state-owned banks, which is relatively low at present, is associated with expenses and operational costs that must be covered. Consequently, the interest rates offered by state-owned banks are relatively higher and difficult to reduce since this would mean taking a cut in revenue. With this in mind, there is a clear gap in level of playing field between the two, which will widen if not controlled immediately.



There is no other alternative for state-owned banks other than to try to keep pace with the efficiency level of foreign-owned banks. Clear policy direction and strategy has to be set without delay. Various issues that have caused soaring overhead costs in state-owned banks have to be resolved immediately. The problem of high NPL has to be rectified without delay as this represents the primary source of the higher costs in terms of the provision for bad assets. Improvements in human resource productivity as well as efficiency in utilizing information technology and other resources have to be made continually in order to attain and even surpass the efficiency level of foreign-owned banks.

Furthermore, **ladies and gentlemen**, the size of the bank also determines the level of efficiency achieved. First of all, in general, a larger bank is able to obtain funds at a cheaper price than the smaller banks. Secondly, larger banks are able to efficiently utilize economies of scale which allow them to split their operational costs over a larger unit. Obviously, foreign-owned banks, which mostly form part of the multinational banking industry, can optimise this advantage.

In this context, banking consolidation, which began in 2005, has become critical and must be accelerated further. We should focus our attention on the options laid out in the Single Presence Policy. We hope that an accurate choice of policy and strategy will allow existing state-owned banks to expand and become healthier, more robust and powerful that are able to serve as Indonesian banking's flag carriers and compete with the global banking industry. Meanwhile, where state-owned banks are expected to support the execution of development programs, these banks must be able to seek and discover market niches that reflect their strengths. Existing state-owned banks must have an edge in expertise, so that their very existence is felt and all elements of the community can be proud.

With regards to the consolidation process, which began three years ago, the **third** step that we are going to take in 2007 is to attempt to facilitate the merger process between banks that we deem in need of assistance. In October 2006, we issued PBI that contains a number of incentives to be distributed in the merger and consolidation process. These incentives represent our greatest endeavours in the form of banking industry initiatives to facilitate mergers, which can immediately reap concrete results.

However, if it becomes clear that in 2007 our efforts to support mergers, particularly those aimed at reducing the number of banks with systemic risk, still lack the necessary positive response, Bank Indonesia will have to become more decisively involved. The matchmaking process, which seeks compatible partners among problematic banks, needs to be facilitated in a more direct and concise way. From our data and information, both quantitative and qualitative, we will try to establish stronger, sounder and more profitable banking institutions that are the result of a useful merger. Matching business patterns, characteristics, targets and market segments are all aspects that are thoroughly considered in this process. However, this is not the case in terms of the majority shareholders' or bank owners' interests. We will exercise extreme caution in accommodating their needs. The balance of needs between one party and another is the result of an agreement that absolutely must be reached in the process. Those parties must be willing to accept and provide deal options that are mutually beneficial. This is where Bank Indonesia will try to take a role in the negotiations, which will head towards the principles of honest brokering; namely neutral, proper and optimal.

The process in its entirety will involve our role as supervisor and also as regulator of the banking industry. The supervisors in Bank Indonesia will commence

work as soon as possible. Therefore, as bank owners, it would be appreciated if you could kindly be more susceptible to cooperation and coordination to achieve the results that we all strive for.

Moving on, the **fourth** step that we will take in 2007 is directed towards facilitating a smooth banking intermediary function, which has become the focal point of the problems faced by our banking industry recently. In my calculation, no fewer than seven Bank Indonesia Regulations have been issued in the past two years to provide breathing space for the banking industry in performing its primary role. I believe it is our role, **distinguished ladies and gentlemen**, to maintain monetary and banking stability. On the one side, we strive to be sensitive towards a plethora of difficulties faced by the banking industry in its efforts to fund development. On the other side however, we also do not wish to see the privileges and dispensation that we have granted destroy our accomplishments. Naturally, the banking industry is a risky industry, and is therefore prone to experience difficulties if not managed carefully.

With respect to these well-known industry characteristics, we strive to ensure that every policy measure taken can strike the optimal balance between the potential risk and rewards gained. For that reason, the policy we have taken this time to foster the intermediary function is not fully relaxed in nature. It is more a policy to facilitate.

One effort that can be immediately done is to study the possibility for banks to finance a some specific sectors such as agriculture which until currently is still lacking of banks attention. Banks credit to this sector is still relatively small, only around 5.3% of total banks credit portfolio. Without special regulation, the agriculture sector would still find it difficult to grow, even though Indonesia has been internationally known as the agriculture nation. Even now, we still have 10 commodities which outperform other countries in the international market, providing good living to the people and generating adequate foreign exchange reserves. In this respect, focus upon agriculture sector is of relevance, at least for the time being before we can move to a wider aspects of agriculture industry. We also need to consider developing agriculture sector within the context of backward and forward linkage. That is why developing partnership between small farmer and medium/large farmer along with the established agriculture corporations will serve as one major condition in developing the sector, so the efforts will not only aiming at increasing production but will also involve technical assistance, marketing as well as to improve small farmers eligibility in accessing banks' credit.

Of the policies that we will issue presently, there will be one to amend the content of a particular PBI, and one will purely be a confirmation letter on the interpretation on some regulations that we have promulgated in the past. We feel that there are numerous regulations that require commonality in interpreting and understanding the substance they are trying to achieve. Some of the regulations, for which the content we shall adjust and/or clarify include:

1. **Regulation Concerning Guidelines to Evaluate Credit Collectibility.** Currently, the guideline to evaluate productive assets over Rp.500 million is based on three criterion pillars, namely prospects, debtor performance and the promptness of payment. There are also some conditions in the evaluation, such as: the obligation to submit an audit report conducted by a public accountant. As such, companies that record losses must be classified as unhealthy. Shortly, we are going to review these regulations and conditions and make the following adjustments:
 - a. The assessment of productive assets of up to Rp.5 billion can be conducted by referring to 1 of the 3 pillars, namely the promptness of payment. The main purpose of this policy is to ease banking in the distribution of credit to potential customers of micro, small and medium enterprises, who still require the support of banking to build and develop their ventures further. To the banking industry itself, this evaluation would improve the condition of debtor collectibility; classified as unhealthy by the three pillars. The improvement in collectibility is attributable to the relaxing of this criterion, which would also reduce the burden of the provision for assets associated with the presence of NPL. Banking costs could also be minimized which would precipitate a drop in the credit interest rate offered. To the public, we predict that micro, small and medium enterprises make up the sector that can directly make use of this privilege. However, we need to bear in mind that all existing privileges must not influence the implementation of risk management and prudential principles that must be exercised when allocating credit. Integrity, professionalism and good governance from banking industry actors fully reflect the quality and competence of **you, distinguished guests here this evening**, in undertaking your responsibilities. We all realize that this is the toughness and robustness that the banking industry stands on.
 - b. An exception to the three pillars is granted for financing of debtors/projects that have obtained government assurance as regulated by PBI No 7/2/PBI

2005 regarding Quality Evaluation of Commercial Banks. With this exception, development projects guaranteed by the government can easily obtain financing from the banking industry. Even a consortium to grant this syndicated credit would be simpler to assemble since the risk signals are concise and measurable.

- c. Pressures on the risk-management ability of banks in credit allocation and evaluation are comparable to the compliance of various secondary qualifications. Some of the collectibility evaluation conditions that are currently deemed as burdensome to banking will be bypassed, as long as the banking industry understands the risk exposure and is prepared with an assortment of mitigation measures as required.

2. **Adjustments to the Regulations Related to Prudential Principles** will be as follows:

- a. Raising the limit for productive asset value through uniform classification from the current value of Rp.500 million to Rp.5 billion; which is sufficient for the top 50 bank debtors.
- b. Including additional types of collateral that can be used to reduce the provision for bad assets. With respect to ongoing dynamics and prevailing conditions, the types of collateral currently regulated will be widened by including equipment and warehouse receipts, as stated in established laws and regulations.
- c. Confirming the Maximum Credit Allocation Limit (*BMPK*) at 30% of capital for state-owned enterprises that reside in the various development sectors. Currently, the banking industry gives the impression that state-owned enterprises eligible for a 30% *BMPK* are only those related to infrastructure. In the future, a 30% *BMPK* will be applicable not only to infrastructure related state-owned enterprises but also state-owned enterprises in other sectors.
- d. Stressing and re-explaining to related parties within *BMPK* regarding the joint financing of some companies (including banks) on a common project. It must be understood that the financial relations of companies involved in joint financing does not restrict their relationship. Therefore, the relationships between the joint financed companies are not classified as interrelated as long as there is no other relationship restriction.

- e. Reiterating that it is possible to allocate credit to problematic debtors providing that the debtors maintain good intentions and that the credit only became bad due to reasons beyond the control of the debtor. It will be possible for such debtors to be eligible for new credit but only after thorough analysis and under close supervision.

The amalgamation of the adjustment and confirmation steps I have just described to you, **ladies and gentlemen**, is expected to underpin the intermediary function of the banking industry, which has been constrained for many years. A holistic, thorough and accurate understanding of valid regulations should form the foundation of every strategic step we take, backed up by a legitimate argument, without over-regulating to maintain stability.

To this end, we internally at Bank Indonesia will also strive to build the capacity of our supervisors in terms of seeing, comprehending and interpreting the existing risk exposure. This way the gap between the supervisor and supervisee of perception and comprehension, utilizing prudential signs when reviewing potential credit, can be eliminated.

The hopes rested on the banking sector to improve the intermediary function are also applicable to foreign-owned banks. Since 2006, this challenge seems to have been addressed positively by the foreign-owned banks. Therefore, the burgeoning credit allocation to productive sectors by foreign-owned banks is very encouraging to see. To maintain the continuity of this wonderful momentum, our **fifth** step in the coming year is to provide guidance to foreign banks to contribute more optimally to the development of the Indonesian economy. It is about time that foreign banks in Indonesia be better focused on more productive and useful endeavours to their host country, especially in their respective position that has dominated the ownership of banks in Indonesia. It is not excessive for us to expect foreign-owned banks to improve their commitment and compliance to support the funding of national development.

Furthermore, the escalating number of foreign-owned banks in Indonesia raises concerns regarding the work opportunities of the domestic professional workforce. The current soaring unemployment rate in Indonesia urges us to ask foreign banks to think about and cooperate to overcome this situation. Concerns of a lull in work opportunities for the local workforce are escalating along with the rising number of foreigners in the Indonesian banking industry. As per what we promised back in 2006, this problem will have to be addressed through a special policy aimed at limiting the number of foreign workers at the middle

management level; which is two levels below the director, except in fields that have proven to be beyond the capabilities of local workers due their rare nature or scarce expertise. Such tenures are limited to a maximum of three years. Using this time frame will force banks that utilize foreign workers in middle management to transfer the knowledge and technology to local employees.

The **sixth** strategic step that will be taken in the near future is to more proactively develop the financial market as well as financial instruments. As I briefly mentioned earlier, our economic recovery in the future calls for a sound, healthy and deep national financial sector that can effectively mitigate the negative effects of shocks in the global financial market. There are currently other implications of a shallow financial market, especially amidst high micro risk. The implications include the constriction of economic funding for long-term investment and less effective monetary policy transmission mechanisms.

The limited numbers of financial products with various durations, as well as primary and secondary markets that support trading, have triggered excess funds to the *SBI* market and short-term portfolio placements. This has pushed the real sector of the economy to rely on consumption stemming from the wealth effect in the financial sector.

Meanwhile, the liquidity overhang in the financial sector, particularly in the banking sector, has reached an alarming level as banking only focuses on short-term financial activities, particularly the short-term deposit market and *SBI* market, without distributing credit for investment.

To address the issues above, I am convinced that the policy to deepen the domestic financial market, as well as to develop innovative financial products, can be a strategic step that will support investment in real sector, which, in turn, may reduce the liquidity overhang. Efforts that can be made to deepen the domestic financial market and widen its products range include issuing SPN and fostering *SBI* of the longer term durations; providing an effective regulatory environment for financial product development that covers medium-term notes, corporate bonds and commercial papers; and providing a greater opportunity for activities related to asset securitization, universal banking and the growth of sharia-based financial instruments. These steps clearly require collaborative efforts from Bank Indonesia, the government as well as banking and non-bank financial institutions. In relation to this, Bank Indonesia will incorporate the issue of financial market development in the Banking Law.

The **seventh** strategic step concerns policy and strategy related to the expansion of sharia banking. Witnessing the rapid growth of the sharia banking industry in our nation, Bank Indonesia believes that it is necessary to expedite such growth in order for the public to reap even greater benefits. We estimate that the total assets of sharia banking, which currently account for about 1.5% of total banking assets, to increase to at least 5% by the end of 2008. Consequently, we will conduct an accelerated program of sharia banking, which will be effectively carried out beginning in 2007. The program to accelerate the expansion of Indonesian sharia banking will be undertaken through three key measures:

First, through more intensive societal education regarding sharia banking. This measure will be taken to improve public understanding and awareness of sharia financing and banking. **Second**, we will stress a review of sharia products, sharia financing services, and encourage the expansion of service outlets to boost the accessibility of sharia banks in line with the public requirement. And **third**, Bank Indonesia will actively participate in supporting incoming foreign investment through sharia financial instruments.

Through these three measures, we hope to make sharia banking the pride of its followers. Sharia banking is not a flash-in-the-pan but something truly monumental, with comparable quality and reach to conventional banking. Sharia banking products and services have to be attractive and formulated in line with public demand. In essence, better realization and understanding from society precipitates greater, real and effective, demand from the public.

In this context I would like to invite you all, distinguished ladies and gentlemen, to actively participate and work hard together to improve integrity, so that the existence of higher quality and more useful sharia banking can be established in society. A unified vision from all stakeholders is crucial when establishing a sound and efficient sharia banking system, considering how sharia banking can position itself as a solution provider. In turn, such circumstances will create a sense of belonging in the community towards sharia banking.

Last but not least, the policy to be implemented in 2007 is associated with the existence of a rural banking industry and its relation to the livelihoods of rural people who are involved in the informal business sector.

We cannot hide the truth that the informal business sector exists and, in fact, supports most of our people's livelihoods. I would even like to note that this sector is indeed a form of social safety net which allows our people to have dreams,

hopes and optimism to survive in their, often difficult, journey through life. Small-scale farmers in villages, traders in traditional markets, cigarette sellers, small-scale grocery vendors and many other agricultural labourers are marginalized by the situation and indeed make up the largest segment of our society. If we want to alleviate the drudgery and improve the quality of life of our people, this is the sector which we must focus our attention. These people are currently in furthestmost row; however it is time to now put them on the forefront in our policies. Putting the last First.

Understanding the dynamics of rural people's lives should be redefined within the context of their relationship with rural banks. Due to the size and specific criteria of commercial banks it is almost impossible for them to finance the informal business sector. We have noticed that credit disbursement to informal sectors requires a particular approach and strategy that are specific to the conditions of these particular sectors, without ignoring the significance of the risk-management system. Prudential principles must reflect market characteristics for which they serve. If a commercial bank client's track record is obtained through standard mechanisms, then the track record of clients or potential clients of BPRs may be sought through the social system established in the society. A supporting empirical fact to this is that BPRs are located within proximity to their clients, furthermore, the BPR's employees are recruited from the banks immediate surrounding. From the very beginning, we have to realize that the relatively small business size of rural banks which located in a specific and limited social environment; are the rural banks' competitive advantage over commercial banks.. Advanced rural banks do not existentially have to operate like commercial banks.

Therefore, going forward, we will review regulations concerning the development of BPRs in increasing its role and contribution as a Micro Finance Agent (LKM). It is hoped that BPRs will be able to maintain the interest of the Small and Medium Enterprises (SME) and the village community and be as agile as other LKM's in meeting the public's needs.

Good functioning BPRs and LKMs must be able to distribute themselves across the country. Indonesia has more than 60.000 villages, however formal banking services have only reached less than 10.000 locations. Therefore, expansion in BPR and LKM's reach is a concrete answer to the SME and village community's need in general.

One of the efforts Bank Indonesia has implemented to support BPR growth is the Linkage Program. The Program entails the channeling of credits to Micro, Small, and Medium Enterprises from Commercial Banks or from Syariah Commercial Banks to BPRs or Syariah BPRs. Without compromising prudential principles, efficiencies and synergies are created from these relationships.

Against this backdrop, the policy direction applied by Bank Indonesia is to redirect the role, function and operational design of rural banks to their fundamental purpose, that is, to serve the common people, particularly those in informal sectors and living in remote areas. The role of rural banks, which was initially to satisfy the financial needs of the common people and in the past primarily meant the informal financial sector, has to be reutilized. The relationship between rural banks and the informal financial sector has to become complementary, looking for assistance and complementing each other to best serve ordinary people.

Meanwhile, as we see the BPRs develop, another issue will need to earn our attention. This is the prevalence of other forms of Micro Finance Institutions (LKMs) which behave very similar to a bank in the sense that they mobilize public funds. Examples include Savings & Loans Cooperations (KSP), Baitul Maal Tamwiil (BMT), Community Credit Institutions (BKD), and Community Funding Body (LPD). The number of the aforementioned institutions reaches not less than 10.000. On the one hand such prevalence provides an array of variations of non-bank financial institutions which add to Micro and Small Enterprises and communities in villages funding alternatives. Its unique characteristics and closeness to the village community enables various LKM's to continue to exist in various communities. However, on the other hand, such LKM's come with its problems, such as lack of clarity as to their various types, forms, and its supervisory authority. Such condition creates situations whereby protection for LKM's stakeholders and the LKM itself are weak. This issue should receive our attention here, ladies and gentlemen. Moving forward, regulation towards various LKMs need to be strengthened.

With that as a background, and also taking into consideration that two years ago was the Year of Micro Credit, we must move quickly and complete initiatives started in 2001 and finalize the Draft for the Law on LKM to become the Law on LKM. I feel that this is worthy of your and our support.

VI. Conclusion

Ladies and Gentlemen, Fellow bankers,

This is what I can convey this evening. While reviewing the set of problems and challenges we face, we all realize that the years to come will not necessarily be any easier than the years that have passed us by. An array of measures to achieve policy success, both from the government and Bank Indonesia, require your unrelenting support and cooperation throughout their execution.

Therefore, we are always open to suggestions and recommendations regarding any of the policies that we have promulgated. We now have time, be it through this informal forum, breakfast meetings with bankers, or chief editors meeting with the mass media; to discuss the various issues raised here this evening. I expect that the existence of such avenues of discussion will minimize any potential arguments and differences that seem to be picked up by and dominate the mass media, which, in turn, do nothing but confuse the general public.

I would also like to take this opportunity to express that in confronting future challenges, we need the involvement and participation of all public elements, including the press. The complexity of our problems requires agents and institutions that never cease worrying or reminding us about them. This is where the role and contribution of the press becomes crucial. The press have the concerns of the common man at heart and therefore always ask questions. The press play a strategic role in building social infrastructure and democracy by remaining impartial and sensitive, always paying attention and constantly reminding us all about the importance of common principals and goals in establishing public prosperity.

An inspiring press core is crucial for the people, especially to us as the policymakers. Constructive reviews from press agents regarding the choices laid bare before us, with their accurate and objective explanations, will make it easier for society as a whole to face the challenges that obstruct the journey ahead. For that reason, I would like to express my appreciation to the press core that has helped us glean enlightened information throughout the years. I hope that the press remain constant in fighting for the establishment of public prosperity. I hope that constructive cooperation may endure into the future between us all.

Finally, let us all work harder and collectively to shoulder this nation, which is currently at a crossroads, towards a new and better horizon.

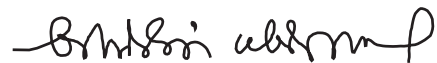
This is an example of how our attitudes must be in terms of progressing into the New Year. We should keep striving to resolve national problems. National banking, on the one side, will continue to clean house and reorganise itself to re-establish its role as a significant intermediary institution. On the other side, Bank Indonesia will strive to consistently steer the required improvements in a disciplined manner.

Once again, Happy New Year for 2007. May Allah SWT bless us all and help illuminate our steps towards a better future. Thank you.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

12th January 2007

Governor of Bank Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Burhanuddin Abdullah', written in a cursive style.

Burhanuddin Abdullah